

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN (RPH) DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**S K R I P S I**



**MARSELINUS DASMAR LURON**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
2016**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH  
POTONG HEWAN (RPH) DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**S K R I P S I**

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Administrasi Negara**

**MARSELINUS DASMAR LURON  
1265141026**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
2016**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat Persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor : 2470/UN.36.6/DL/2016; tanggal 25 Mei 20 16 untuk membimbing saudara :

Nama : Marselinus Dasmal L.  
NIM : 1265141026  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (SI) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Pembimbing I

Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.si  
NIP. 19641111 198903 2 001

Makassar, Juli 2016

Pembimbing II

Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si  
NIP. 19510925 197602 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Marselinus Dasmal L.  
NIM : 1265141026  
Tempat/ Tgl. Lahir : Makassar, 06 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah  
Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja

Dengan pembimbing masing-masing :

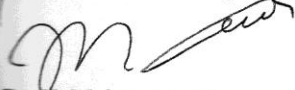
1. Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.si
2. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.


Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya siap dituntut didalam maupun diluar pengadilan dan menanggung resiko yang diakibatkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab moral untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui oleh :  
Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara FIS UNM

  
Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si  
NIP. 19601231 198803 1 011

Makassar, Juli 2016  
yang membuat pernyataan


  
Marselinus Dasmal L.  
NIM. 1265141026

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


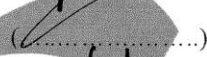




Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan SK Dekan No. 3624/UN36.6/KM/2016 Tanggal 01 Juli 2016. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Makassar

  
**Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum**  
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Ujian :

- |                  |                                   |   |
|------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Ketua         | : Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum  |   |
| 2. Sekretaris    | : Ismail, S.Pd., M.Si             |  |
| 3. Pembimbing I  | : Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si |  |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si    |  |
| 5. Penguji I     | : Dr. Risma Niswaty, SS., M.Si    |   |
| 6. Penguji II    | : Dr. Muh. Nur Yamin M.Si         |  |

## **MOTO**

*Banyak orang memimpikan kesuksesan. Bagi saya kesuksesan hanya dapat diraih melalui kegagalan yang berulang-ulang dan introspeksi.  
(Soichiro Honda)*

*Suatu perbuatan yang cemerlang tanpa, cinta sama sekali tidak berarti  
-St. Therese of Lisieux-*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta,  
Saudara-saudaraku, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan.  
Atas segala dukungan, pengorbanan, dan doanya selama ini.*

## **ABSTRAK**

Marselinus Dasmir Luron. 2016. Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Herlina Sakawati dan Maharuddin Pangewa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian berdasarkan indikator-indikator yang diteliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja belum berjalan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas implementasi hanya terjadi pada aspek komunikasi yakni transmisi dan kejelasan serta aspek struktur birokrasi, sedangkan indikator yang lain menunjukkan hasil yang belum efektif. Oleh karena itu, diberikan beberapa saran sebagai referensi untuk meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Tana Toraja”.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas; Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian, Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual, Bab III Metode Penelitian yang menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, deskripsi fokus penelitian, tahap-tahap penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data dan pengecekan keabsahan data, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Hal tersebut semata karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis siap menerima masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Melalui tulisan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Husain Syam, M.Tp., Rektor Universitas Negeri Makassar beserta staf atas segala bentuk pelayanannya.
2. Prof. Dr. Hasnawi Haris, M. Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan izin dan persetujuan mengadakan penelitian.



3. Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
4. Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si., Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing I yang dengan keikhlasannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si., Pembimbing II yang dengan kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan sumbangan pemikiran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penelitian ini.
6. Dr. Risma Niswaty, SS, M.Si., Penguji I yang telah memberikan dorongan dan sumbangan pemikiran dalam penelitian ini.
7. Dr. Muhammad Nur Yamin, M.Si., Penguji II yang juga telah memberikan dorongan dan sumbangan pemikiran dalam penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar khususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas jerih payah mendidik peneliti selama di bangku perkuliahan.
9. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Daniel Doni Suron dan Ibunda Marselina Toding serta keluarga besar yang penuh pengorbanan memberikan restunya dan dorongan serta tidak henti-hentinya mendoakan dan memotivasi dalam penyelesaian studi.

10. Sir Robert Jao yang telah memberikan semangat dan dukungan yang sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat universitas.
11. Teman seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012 yang selama ini menyumbangkan arti kebersamaan.
12. Seluruh kawan HIMAGARA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) yang selama ini memberi arti kehidupan, pengalaman berharga, serta kebersamaan dalam suka dan duka.
13. Semua kerabat di UD. Arini yang telah memberikan pengalaman dan dukungan dalam proses perkuliahan peneliti.
14. Seluruh teman BPEC (Benteng Penyuyua Englis Club) Makassar yang telah memberikan banyak pengalaman dan dukungan dalam pengembangan kemampuan diri penulis.
15. Seluruh teman KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik) Makassar yang telah memberikan pengalaman kekeluargaan dan solidaritas.

Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, Juli 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Konsep Implementasi .....	7
2. Konsep Kebijakan.....	9
3. Konsep Implementasi Kebijakan.....	11
4. Konsep Retribusi .....	17
5. Konsep Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).....	19
B. Kerangka Konseptual .....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian .....	23
C. Deskripsi Fokus Penelitian .....	23
D. Tahap-Tahap Penelitian.....	25

E. Jenis dan Sumber Data .....	27
F. Instrumen Penelitian .....	28
G. Prosedur Pengumpulan Data .....	29
H. Pengecekan Keabsahan Data .....	30
I. Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian.....	40
C. Pembahasan .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi .....	69
C. Saran .....	70
Daftar Pustaka .....	71
Lampiran-Lampiran .....	73
Daftar Riwayat Hidup .....	101

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Target dan Pencapaian Retribusi RPH .....	3
2.	Pembagian Wilayah Kabupaten Tana Toraja .....	34
3.	Kondisi Demografi .....	35
4.	Rekapitulasi Penerimaan RPH Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015.....	37
5.	Penerimaan RPH Kecamatan Rembon 2015 .....	40

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Skema Krangka Konseptual .....	22
2.	Penjabaran Tugas Implementasi Retribusi RPH .....	45
3.	Struktur Birokrasi Sederhana Alur RPH .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Matriks Penelitian.....	73
2.	Matriks Pedoman Wawancara .....	75
3.	Daftar Nama-nama Informan.....	77
4.	Data Hasil Wawancara .....	79
5.	Surat Persetujuan Judul dan Calon Pembimbing.....	91
6.	Surat Permohonan Pengesahan Judul Skripsi dan Pembimbing .....	92
7.	Surat izin melaksanakan penelitian dari fakultas .....	93
8.	Surat Izin Penelitian BKPM SULSEL.....	94
9.	Surat Izin Penelitian DPPKAD Kabupaten Tana Toraja.....	95
10.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian .....	96
11.	Dokumentasi.....	97
12.	Daftar Riwayat Hidup.....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah bagian penting dari proses pemerintahan bangsa Indonesia. Kebijakan Otonomi Daerah telah memberikan sumbangsih yang begitu besar bagi proses pembangunan bangsa. Pemerintah daerah otonom diberi kewenangan untuk menjalankan proses pemerintahannya melalui pemanfaatan potensi masyarakat dan lingkungan setempat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah landasan hukum pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menumbuhkembangkan proses pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap pembangunan dan pelayanan publik pada daerahnya masing-masing.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan daerah. Di samping itu, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur sendiri sumber-sumber PAD berdasarkan karakteristik daerahnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2014 pasal 157 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain



pendapatan asli daerah. Semua sumber PAD tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Retribusi daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar untuk menunjang proses pembangunan dan pemerintahan daerah. Retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 pasal 18 ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah akan memberikan hasil yang maksimal apabila proses implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>1</sup>

Berdasarkan jenisnya, Retribusi Daerah dibedakan atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) adalah salah satu jenis Retribusi Daerah yang tergolong ke dalam jenis retribusi jasa usaha.

Masyarakat Tana Toraja yang terkenal akan warisan budayanya yang identik dengan pemotongan hewan dalam jumlah yang besar untuk acara Rambu Tuka' (Upacara Syukuran) dan Rambu Solo' (Upacara Pemakaman) memperoleh sumber PAD yang cukup besar melalui Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH). Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, kebijakan retribusi RPH bertujuan untuk memungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan

---

<sup>1</sup> UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 18. Ayat 2

sebelum dipotong.<sup>2</sup> Adapun pencapaian retribusi RPH di pada Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut

Tabel 1. Target dan Pencapaian retribusi RPH Kab. Tana Toraja tahun 2011-2015

No.	Tahun	Target	Pencapaian	Persentase
1.	2011	Rp. 29.000.000	Rp. 21.352.500	73.6%
2.	2012	Rp. 29.000.000	Rp. 23.775.000	82%
3.	2013	Rp. 2.454.500.000	Rp. 2.307.110.000	94%
4.	2014	Rp. 1.949.465.000	Rp. 2.132.160.000	109%
5.	2015	Rp. 1.790.965.000	Rp. 2.164.885.000	120.8%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja

Data dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2013 pencapaian RPH tidak sesuai dengan target. Namun pencapaian target RPH terjadi di tahun 2014 dan 2015, bahkan melampaui target.

Proses implementasi retribusi RPH khususnya di Kabupaten Tana Toraja tidak berjalan secara maksimal disebabkan oleh berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut seperti kurangnya sosialisasi mengenai jumlah retribusi yang harus dibayar, kupon retribusi yang tidak diberikan kepada pembayar retribusi, petugas retribusi yang tidak memiliki SK tugas, petugas retribusi yang memberikan pengurangan biaya retribusi bagi kerabatnya, uang retribusi yang tidak disetor ke bendahara kecamatan dalam waktu 24 jam sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan, serta tidak hadirnya petugas pengawas dari pemerintah daerah di pos penarikan retribusi dalam kegiatan adat.

Suryadanita telah mengadakan penelitian pada tahun 2013 yang berkaitan dengan retribusi RPH dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan

---

<sup>2</sup> Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Pemotongan Kerbau Akibat Kenaikan Retribusi di Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Dari penelitian terdahulu tersebut diperoleh kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemotongan kerbau akibat kenaikan retribusi di Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara berdasarkan variable tanggapan, keandalan, jaminan dan empati adalah belum maksimal. Artinya, pelayanan yang diberikan pihak kecamatan kepada masyarakat yang melakukan pemotongan kerbau di luar RPH yaitu pada Rambu Tuka' dan Rambu Solo' masih kurang optimal seperti kurangnya ketepatan waktu untuk melayani, kurang kesigapan dalam membantu, jumlah karcis yang diberikan tidak sesuai dan keluhan-keluhan masyarakat yang kurang direspon.<sup>3</sup>

Selain itu, Yances juga melakukan penelitian pada tahun 2013 terhadap retribusi RPH dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Retribusi Potong Hewan Pada Upacara Adat Toraja Utara. Fokus penelitian terdahulu ini adalah penerapan system Akuntansi dan system pengendalian intern penarikan retribusi RPH. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah SPI dalam system penerimaan retribusi RPH di Toraja Utara pada umumnya masih tergolong lemah karena penggunaan wewenang, pembagian tugas, dan pengecekan independen yang belum sepenuhnya dijalankan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa proses implementasi khususnya pelayanan retribusi RPH belum memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini yang menjadi

---

<sup>3</sup> Alfon Suryadanita. 2013. *Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pemotongan kerbau akibat kenaikan retribusi di kecamatan tallunglipu, kabupaten toraja utara*. Skripsi.

<sup>4</sup> Aderaty Yances. 2013. *Analisis Sistem Pengendalian Intern (SPI) Dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Pada Upacara Adat Toraja Utara*. Skripsi.

fokusnya adalah proses implementasi kebijakan retribusi RPH. Dengan demikian, judul penelitian yang diangkat adalah “Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja”.

## **B. Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni: Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi?

### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah keberhasilan implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) ditinjau dari 4 (empat) aspek yaitu:

- a. Komunikasi (transmisi, kejelasan dan konsistensi)
- b. Sumber daya (staf, informasi, wewenang, dan fasilitas)
- c. Disposisi terdiri (pengangkatan birokrat, sikap petugas dan insentif)
- d. Struktur birokrasi

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yakni: untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah implementasi kebijakan retribusi.
- c. Memperoleh pengetahuan tentang sumbangsih retribusi Rumah Potong Hewan bagi Pendapatan Asli Daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja secara khusus dan Pemerintah secara umum dalam upaya meningkatkan hasil retribusi RPH sesuai dengan target yang ditentukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Konsep Implementasi

Kajian mengenai teori implementasi bukan lagi menjadi hal baru dalam bidang ilmu Administrasi Negara. Teori implementasi telah dikaji dan diteliti oleh berbagai ahli hingga saat ini. Keberhasilan sebuah kebijakan publik yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh *policy maker* ditentukan dalam proses implementasinya.

Implementasi telah menjadi suatu kajian penting dalam suatu kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaannya. Gunn dan Hoogwood (dalam Tahir) mengemukakan bahwa “Implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.<sup>5</sup>

Purwanto dan Sulistyastuti mengemukakan secara ontologis, bahwa:

*Subjet matter* studi implementasi adalah untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti 1) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah; 2) mengapa suatu kebijakan publik yang sama yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah; 3) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain; 4) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.<sup>6</sup>

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan

---

<sup>5</sup> Gunn dan Hoogwood dalam Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Alfabeta, hal. 55

<sup>6</sup> Purwanto dan Sulistyastuty. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, hal 18.

otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.<sup>7</sup>

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Purwanto dan Sulistyastuti yang mengemukakan bahwa:

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk tujuan kebijakan.<sup>8</sup>

Melalui pendapat tersebut dapat dipahami bahwa implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan atau tanpa tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program dapat terlaksana.

Sementara itu, Grindle (dalam Winarno) memiliki pandangan tersendiri mengenai implementasi dengan mengatakan bahwa “Secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”.<sup>9</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

---

7 Ripley dan Franklin dalam Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita, hal. 145.

8 Purwanto dan Sulistyastuti. *op. cit*, hal 21.

9 Grindle dalam Winarno. *op. cit*, hal 146.

Melalui beragam pendapat ahli di atas tentang implementasi dapat diketahui bahwa terdapat tiga poin utama dalam proses implementasi yaitu: 1. adanya tujuan kebijakan, 2. adanya kegiatan pencapaian tujuan, dan 3. adanya hasil kegiatan. Ketiga poin tersebut menjadi bagian penting yang menjelaskan proses dalam implementasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses perwujudan sebuah kebijakan melalui kegiatan-kegiatan atau program-program terencana yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan untuk memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

## **2. Konsep Kebijakan**

Saat ini, kebijakan publik telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat umum. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat ditemui dalam bidang kesejahteraan sosial, di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, pendidikan nasional, dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut ada yang berhasil dan ada yang tidak.

Menurut Eystone (dalam Wahab) kebijakan publik ialah “*the relationship of governmental unit to its environment*.” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya).<sup>10</sup>

Nugroho menjelaskan bahwa “Kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut.”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Eystone dalam Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. hal 13.

<sup>11</sup> Rian Nugroho. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia. hal 143.



Heglo (dalam Abidin) mendefinisikan “Kebijakan sebagai *a course of action intended to accomplish some end*, atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu”.<sup>12</sup>

Ealu dan Prewitt (dalam Nawawi) mengemukakan bahwa “Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).”<sup>13</sup>

Menurut Winarno istilah “Kebijakan (*policy*) digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu.”<sup>14</sup> Pengertian kebijakan ini dapat digunakan untuk keperluan pembicaraan yang sedang, namun menjadi kurang tepat digunakan untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis mengenai analisis kebijakan publik.

Dye (dalam Subarsono) mengemukakan bahwa “Kebijakan Publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”.<sup>15</sup> Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Rose (dalam Agustino) yang mendefinisikan “Kebijakan Publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak-

---

12 Heglo dalam Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humaika. hal 6.

13 Ealu dan Prewitt dalam Ismail Nawawi. 2009. *Public Policy*. Surabaya: cv. Putra Media Nusantara. hal 6.

14 Winarno. *op. cit.* hal 16

15 Dye dalam Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 2.

atau-sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”.<sup>16</sup> Rose memberikan pemahaman bahwa kebijakan publik merupakan pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.

Berdasarkan berbagai sudut pandang para ahli di atas maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik mengandung unsur-unsur seperti adanya keputusan yang dibuat oleh *policy maker* (pembuat kebijakan), fokusnya pada tindakan yang memiliki tujuan, mengandung pola kegiatan, serta dapat dan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, dalam studi kebijakan publik yang menjadi utama adalah apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekadar yang ingin dilakukan.

### 3. Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan produk kebijakan tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Tachjan (dalam Tahir) mengemukakan bahwa:

Implementasi kebijakan publik, di samping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Rose dalam Leo Agustino. 2012. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hal 7.

<sup>17</sup> Tachjan dalam Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Alfabeta, hal 53.

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administratif secara seimbang.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno) memberikan batasan bahwa:

Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>18</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa setelah sebuah keputusan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Terdapat beragam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau instansi. Kompleksitas implementasi tidak hanya ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh variabel yang kompleks yang saling berpengaruh satu sama lain.

Egonmwan (dalam Purwanto dan Sulistyastuti) menggambarkan kompleksitas dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan dalam proses implementasi itu sebagai berikut:

*It refers to process of converting financial, material, technical and human inputs into output – goods and services.*” Artinya, implementasi kebijakan adalah proses yang mengarah kepada konversi finansial, material, teknik dan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang atau pelayanan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Van Meter dan Van Horn dalam Winarno. *op. cit*, hal 146.

<sup>19</sup> Egonmwan dalam Purwanto dan Sulistyastuti, *op. cit*, hal 64.

*Policy outcomes* (hasil kebijakan) akan dapat dihasilkan setelah melalui proses yang kompleks tersebut. Dampak kebijakan yang nyata adalah adanya perubahan yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, tahapan implementasi sebagai tahapan untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*).

Ripley dan Franklin (dalam Tahir) mengemukakan:

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu: 1) perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya; 2) perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah; 3) perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.<sup>20</sup>

Rondinelli dan Cheema (dalam Purwanto dan Sulistyastuti)

mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1) Kondisi lingkungan (*environmental conditions*); 2) Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*); 3) Sumber daya (*resources*); 4) Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).<sup>21</sup>

Menurut Mazmanian (dalam Subarsono), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); 2) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); 3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).<sup>22</sup>

George C. Edwards III (dalam Agustino) pada hakekatnya menyatakan bahwa “Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan

<sup>20</sup> Ripley dan Franklin dalam Tahir. *op. cit*, hal. 64

<sup>21</sup> Rondinelli dan Cheema dalam Purwanto dan Sulistyastuti. *op. cit*, hal 90

<sup>22</sup> Mazmanian dalam Subarsono. *op. cit*, hal 94

implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.”<sup>23</sup> Keempat variabel tersebut, adalah sebagai berikut:

#### 1) Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif ketika pihak-pihak yang melaksanakannya mengetahui apa yang harus dilakukannya. Oleh karena itu, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada pihak yang melaksanakannya. Di samping itu, dibutuhkan spesifikasi tugas bagi para pelaksana agar kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Faktor komunikasi berperan untuk menunjukkan tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan. Hal ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dipahami sebagai perintah dari atasan kepada para pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Untuk itu, komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Menurut George C. Edwards III (dalam Agustino) terdapat tiga variable untuk mengukur keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.<sup>24</sup> Transmisi adalah proses penyaluran informasi kebijakan. Proses penyaluran yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif. Kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan sehingga tidak terjadi penyelewengan dan miskomunikasi dalam implementasi kebijakan. Kemudian, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi

---

<sup>23</sup> George C. Edwards III dalam Leo Agustino. *op. cit*, hal 149.

<sup>24</sup> *ibid*, hal 150.

haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Edwards III (dalam Tahir) menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya”.<sup>25</sup> Agustino juga menegaskan bahwa komunikasi menjadi efektif apabila “Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan).”<sup>26</sup>

## 2) Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang dengan sumber daya baik sumber daya manusia, material, dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi sebuah implementasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang ada. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen semata yang tidak kunjung diwujudkan.

Sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan, terdiri atas staff sebagai pelaksana kebijakan, informasi berupa peraturan atau kebijakan yang dibutuhkan dalam proses implementasi, wewenang berupa perintah kepada petugas untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, dan fasilitas berupa alat dan kelengkapan yang

---

<sup>25</sup> George C. Edwards III dalam Tahir. *op. cit*, hal 62.

<sup>26</sup> Agustino. *op. cit*, hal 151.

dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Indikator keberhasilan sumber daya menurut Agustino yaitu “Staff yang kompeten, informasi pelaksanaan yang jelas, wewenang formal yang jelas dan fasilitas sebagai sumber daya pendukung yang jelas”.<sup>27</sup>

### 3) Disposisi

Disposisi adalah karakter dan sikap yang hendaknya dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan demokratis. Implementor hendaknya dapat mengaplikasikan karakter dan sikap tersebut agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam pemilihan petugas hendaknya memperhatikan kemampuan dan kapasitas yang dimilikinya. Di samping itu, disposisi juga berkaitan dengan pemberian insentif. Pemberian insentif akan menjadi motivasi kerja bagi para petugas untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Tahir menegaskan bahwa:

Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>28</sup>

### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan peta sederhana yang menunjukkan penjabaran fungsi dan tugas para staff. Garis-garis yang menghubungkan antarbagian menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan. Struktur birokrasi

---

<sup>27</sup> Agustino. *loc cit.*

<sup>28</sup> Tahir, *op. cit.*, hal 69

mempunyai peranan yang penting karena menjabarkan mengenai tingkatan-tingkatan koordinasi yang ada sampai pada terlaksananya sebuah kebijakan. Agustino menuliskan bahwa “Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.”<sup>29</sup>

Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah Model Edwards III. Model ini menjadi teori pada penelitian yang akan dilaksanakan karena adanya kesesuaian dengan letak permasalahan yang ditemukan di lapangan dalam kaitannya dengan Retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja, . Masalah- masalah yang diuraikan di latar belakang penelitian ini dapat dikaji dengan menggunakan variable seperti yang terdapat dalam teori Edwards III.

#### **4. Konsep Retribusi**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.”<sup>30</sup>

Bratakusumah dan Solihin menjelaskan bahwa “Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah.”<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian pendapat di atas maka dapat dipahami secara sederhana bahwa retribusi adalah salah satu pendapatan asli daerah yang dapat

---

<sup>29</sup> Agustino, *op. cit*, hal 153

<sup>30</sup> UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

<sup>31</sup> Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. SUN, hal 283.



digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa tertentu tersebut digolongkan ke dalam tiga bagian yakni Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

Menurut Bratakusumah dan Solihin, prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagai berikut:

- 1) Untuk Retribusi Jasa Usaha (RJU), berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi ini pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- 2) Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi ini ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi ini ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Menurut Ahmad Yani subjek retribusi dan wajib retribusi ditentukan sebagai berikut:

- 1) Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
- 2) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

---

<sup>32</sup> *ibid*, hal 284.

- 3) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.<sup>33</sup>

## 5. Konsep Retribusi Rumah Potong Hewan

Berdasarkan Perda Kab. Tana Toraja No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.<sup>34</sup> Objek retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam Perda Kab. Tana Toraja No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran tarif retribusi RPH digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak serta besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.

Struktur dan besaran tarif berdasarkan ketentuan tersebut, yakni:

- 1) Kerbau Rp. 75.000,-/ekor
- 2) Sapi Rp. 50.000,-/ekor
- 3) Babi Rp. 30.000,-/ekor
- 4) Kambing dan domba Rp. 25.000,-/ekor

Struktur dan besaran tarif retribusi RPH yang dilakukan di rumah potong hewan yang dibuat secara insidentil untuk kegiatan tertentu, yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, maka retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kerbau Rp. 150.000,-/ekor
- 2) Sapi Rp. 100.000,-/ekor
- 3) Kuda Rp. 100.000,-/ekor
- 4) Rusa Rp. 75.000,-/ekor
- 5) Babi Rp. 75.000,-/ekor
- 6) Kambing Rp. 45.000,-/ekor

<sup>33</sup> Ahmad Yani. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, hal 63.

<sup>34</sup> Perda Kab. Tana Toraja No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pasal 1, ayat 17.

- 7) Bentuk lainnya (yang disamakan dengan nilai hewan) Rp. 30.000,-/ekor.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka di atas tentang kosep implementasi, konsep kebijakan, konsep implementasi kebijakan, retribusi dan retribusi RPH, maka akan dilakukan penelitian retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja dengan pusat penelitian di Kecamatan Rembon berdasarkan teori George C. Edwards III (dalam Agustino, yang terdiri dari 1) komunikasi; 2) sumber daya; 3) disposisi; dan 4) struktur birokrasi.<sup>36</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PHN.140-HN.01.06 Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013 (2013: 42-43) diuraikan bahwa terdapat beberapa indikator untuk menilai efektifitas dan efisiensi implementasi retribusi, yakni sebagai berikut:

1. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
  - a. Dapat dipungut secara efektif: berarti pungutan tersebut dapat dihitung dan dipungut dengan mudah;
  - b. Dapat dipungut secara efisien: berarti biaya pemungutan retribusi (biaya gaji/upah/tunjangan pegawai pemungut, ongkos kantor yang bersangkutan, biaya perjalanan dinas, dan sebagainya) tidak melebihi hasil penerimaan retribusi.
  - c. Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial: berarti potensi penerimaan sebanding dengan biaya penyediaan pelayanan.
2. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik Alokasi

---

<sup>35</sup> *ibid*, pasal 21.

<sup>36</sup> Edwards III dalam Leo Agustino. *op. cit*, hal 249.

penerimaan retribusi diutamakan untuk peningkatan kualitas pelayanan.<sup>37</sup>

## **B. Kerangka Konseptual**

Kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar. Pemotongan hewan selalu melekat dalam Budaya Masyarakat Toraja pada berbagai kegiatan. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung implementasi retribusi RPH.

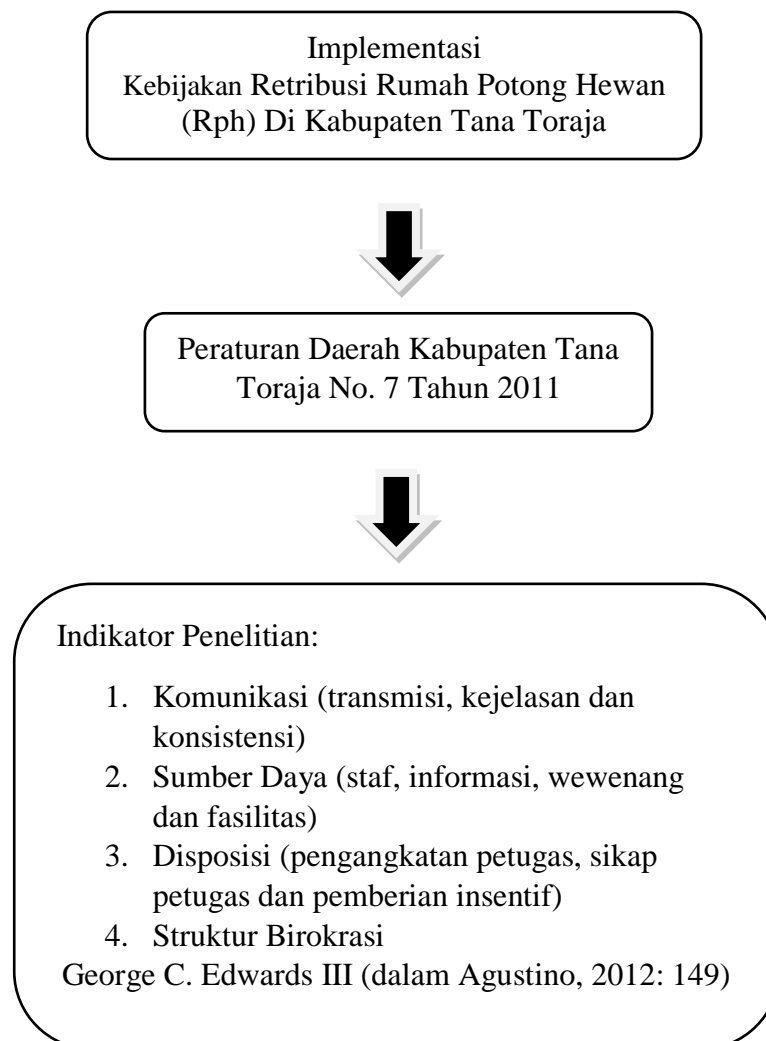
Keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh implementasinya. Untuk itu implementasi kebijakan hendak mendapat perhatian penting agar sebuah kebijakan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan retribusi khususnya RPH memiliki lokus di Kabupaten Tana Toraja. Dengan berbagai masalah yang terjadi seperti yang diuraikan dalam latar belakang, maka diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan model George C. Edwards III, yang terdiri dari:

1. Komunikasi, yaitu indikator yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan Retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja kepada petugas dan masyarakat berdasarkan aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Sumber daya, yaitu indikator yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja yang meliputi staf atau kolektor RPH, informasi, wewenang dan fasilitas.

---

<sup>37</sup> Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor PHN.140-HN.01.06 Tahun 2013 tertanggal 1 Maret 2013 (2013: 42-43).

3. Disposisi, yaitu indikator yang berkaitan dengan proses pengangkatan petugas, sikap petugas dan pemberian insentif yang dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja.
4. Struktur birokrasi, yaitu indikator yang berkaitan dengan tingkat koordinasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan retribusi RPH yang dimulai dari DPPKAD, kecamatan, *Lembang* dan kolektor RPH.



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena variabel dan keadaan yang diperoleh saat penelitian dan disajikan secara objektif.

Jenis penelitian deskriptif/kualitatif dianggap tepat digunakan dalam meneliti tentang implementasi Retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja karena ditujukan kepada fakta-fakta yang terjadi, informasi serta data-data retribusi RPH Kabupaten Tana Toraja, yang selanjutnya akan diolah berdasarkan teori yang ada hingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara khusus di Bidang Penagihan dan Penerimaan. Penelitian ini disertai dengan pengambilan data di Kecamatan Rembon, *Lembang Batusura* dan *Lembang Limbong*.

#### **C. Tahap-Tahap Penelitian**

##### **1. Penelitian Pendahuluan**

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti melalui observasi awal, studi kepustakaan dan penelitian terdahulu. Tahap

ini bertujuan untuk memahami latar belakang penelitian serta mempersiapkan teori dan instrumen yang akan dibutuhkan untuk penelitian.

## 2. Pengembangan desain penelitian

Tahap ini adalah proses untuk menentukan informasi, teori serta instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan utama tahapan ini adalah untuk mengembangkan desain penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam tahapan ini akan diidentifikasi dan dipilih masalah penelitian serta kerangka konseptual yang akan digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian menurut tujuannya yakni penelitian deskriptif.

## 3. Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan pengambilan data mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam tahapan ini dikumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan dalam tahap penulisan laporan. Lokasi pelaksanaan penelitian ini telah diuraikan dalam bagian lokasi penelitian skripsi ini.

## 4. Penulisan Laporan

Tahap laporan merupakan tahapan akhir dari kegiatan penelitian. Pada tahapan ini data yang telah diperoleh pada tahap penelitian akan direduksi sebelum disajikan dan akan disimpulkan. Tahapan ini bertujuan sebagai publikasi bagi instansi yang terkait untuk dijadikan bahan evaluasi atas hasil penelitian yang

telah dilakukan. Dengan demikian, diharapkan saran yang terdapat pada bagian penutup skripsi ini dapat menjadi masukan yang positif dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja.

#### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

##### **1. Komunikasi**

Terdapat tiga indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dari segi komunikasi, yakni transmisi atau peyaluran, kejelasan dan konsistensi. Indikator tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai implementasi kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja.

##### **a. Transmisi**

Transmisi adalah proses penyampaian informasi dengan baik agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Aspek transmisi dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui proses transmisi kebijakan retribusi RPH kepada petugas dan masyarakat.

##### **b. Kejelasan**

Aspek kejelasan ialah bagaimana informasi kebijakan retribusi RPH dapat disampaikan dengan jelas kepada pelaksana sehingga dapat diimplementasikan dengan tepat.

##### **c. Konsistensi**

Aspek konsistensi yakni tentang perintah yang diberikan kepada para pelaksana retribusi RPH harus konsisten dan jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik.



## 2. Sumber daya

Sumber daya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

### a. Staf

Staf adalah sumber daya utama dalam implementasi sebuah kebijakan. Dalam kaitannya dengan indikator ini maka akan diteliti apakah jumlah petugas yang ada dapat menjalankan tugasnya secara maksimal serta sejauh mana pemahaman petugas terhadap kebijakan retribusi RPH dalam pelaksanaannya di lapangan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka dibutuhkan jumlah petugas yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

### b. Informasi

Informasi dalam penelitian ini yakni informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana ketersediaan peraturan pelaksanaan kebijakan retribusi RPH.

### c. Wewenang

Wewenang merupakan salah satu aspek yang hendak dimiliki oleh petugas pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini dalam kaitannya dengan aspek wewenang difokuskan pada sejauh mana petugas menjalankan wewenangnya masing-masing dengan baik.

#### d. Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud dalam kaitannya dengan implementasi retribusi RPH yakni kupon, pos retribusi. Dalam penelitian ini, akan diteliti apakah fasilitas yang tersedia telah memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan retribusi RPH.

### 3. Disposisi

Terdapat 3 aspek yang akan diteliti dalam kaitannya dengan disposisi yakni pengangkatan birokrat, sikap petugas dan pemberian insentif. Dalam pengangkatan birokrat akan diteliti mengenai proses pemilihan dan pengangkatan pelaksana retribusi RPH, bagaimana sikap petugas dalam melaksanakan tugasnya dan pemberian insentif.

### 4. Struktur birokrasi

Dari segi struktur birokrasi, penelitian ini akan difokuskan pada seberapa jauh tingkat koordinasi kebijakan retribusi RPH dari pimpinan sampai petugas retribusi di lapangan sebagaimana yang digambarkan dalam struktur birokrasi yang ada. Dengan demikian, akan diketahui apakah struktur birokrasi yang ada mendukung proses implementasi yang maksimal atau tidak.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari kalimat-kalimat ataupun tindakan-tindakan dari informan yang merupakan data primer dan tulisan-tulisan atau gambar yang mendukung pernyataan informan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan di lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan mengenai implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja, . Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Bapak Leksi, SE.
- b. Camat Kecamatan Rembon Bapak Welem Balalembang, SP.
- c. Bendahara Penerima RPH Kecamatan Rembon Bapak Daud Saranga'
- d. Kepala *Lembang* Batusura' Bapak Farel A. R.
- e. Kepala Dusun Tosik *Lembang* Batusura Bapak Andarias Dalame
- f. Kepala RK Panambu *Lembang* Batusura' Bapak Marten Palangiran
- g. Kolektor RPH *Lembang* Limbong Bapak Kadir Pasila
- h. Oktaviani Misi, SE., sebagai masyarakat.
- i. Marten Bontong, sebagai masyarakat.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lokus dan fokus penelitian.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data agar dapat berjalan dengan sistematis dan mudah. Dalam proses pengambilan data dibutuhkan instrumen berupa pedoman wawancara, alat rekam serta alat dokumentasi.

## **G. Prosedur Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

### **1. Observasi (Pengamatan)**

Peneliti akan mengamati secara langsung objek penelitian dan mencatat gejala-gejala yang berkaitan dengan implementasi retribusi RPH. Observasi akan dilengkapi dan didukung oleh pengambilan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan dalam kegiatan yang melibatkan adanya penarikan retribusi RPH.

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dan dialog secara langsung dengan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan retribusi RPH. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang menguraikan fokus dan deskripsi fokus penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada Ketua Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Tana Toraja, Camat Kecamatan Rembon, Bendahara Penerima RPH Kecamatan Rembon, Kolektor RPH, Kepala *Lembang*, Ketua RK, Kepala Dusun dan masyarakat. Dalam wawancara tersebut penulis membawa instrumen berupa pedoman wawancara, alat tulis dan alat rekam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 Juni 2016.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu sumber data yang penting dalam penelitian ini untuk mendukung keakuratan data dan proses penelitian. Selain itu, file dokumentasi akan menjadi bukti keabsahan telah dilakukannya sebuah penelitian. Dokumentasi dalam hal ini terdiri dari dokumen-dokumen, foto atau video yang didapatkan selama proses penelitian. Dokumentasi menjadi penting karena fakta dan data yang diperoleh sebagian besar tersimpan dalam bentuk dokumentasi, berupa gambar-gambar, tulisan atau bentuk dokumentasi lainnya.

#### **H. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data merupakan tahapan untuk menguji kredibilitas data terhadap data hasil penelitian dengan cara, sebagai berikut :

##### 1. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Triangulasi dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh pada beberapa sumber dengan teknik sama. Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda dan yang spesifik. Informasi tersebut akan menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan kesimpulan.

##### 2. *Member Check*

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan tahapan ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data maka data tersebut *valid*.

*Member check* dilakukan setelah pengumpulan data selesai atau setelah memperoleh kesimpulan.

## **I. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan didasari oleh model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 246) yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh. Sementara itu, Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 246) memiliki bentuk teknik analisis yang disebut *interactive model*, dimana terdiri atas reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

### **1. Reduksi Data ( *Data Reduction* )**

Reduksi data adalah proses memilih hal-hal pokok, merangkum, penyederhanaan, memfokuskan pada hal-hal penting dari data dengan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti dengan tujuan untuk memilih informasi yang sesuai fokus penelitian. Dalam proses ini akan diamati dan diambil data-data yang berkaitan dengan proses implementasi retribusi RPH di lapangan.

### **2. Penyajian Data (Data Display)**

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk paragraph naratif secara terorganisir sehingga dapat dipahami dengan mudah. Data yang telah disusun tersebut akan menjadi informasi penting untuk proses penarikan kesimpulan.

### **3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan terakhir dari rangkaian penelitian ini. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan diverifikasi sehingga dapat diuji validitasnya. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh dapat diuji kebenarannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah Kabupaten Tana Toraja, gambaran umum objek penelitian yaitu Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Kantor Camat Rembon, Kabupaten Tana Toraja.

#### **1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja**

##### **a. Kondisi Wilayah**

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale secara geografis terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan yaitu antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km<sup>2</sup> persegi. Secara geografis batas wilayah Kabupaten Tana Toraja meliputi:

- 1) Sebelah utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat
- 2) Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- 3) Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu
- 4) Sebelah Barat adalah Propinsi Sulawesi Barat

Secara administratif, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 Kecamatan, 112 *Lembang* dan 47 kelurahan. Pembagian wilayah menurut kecamatan, jumlah *Lembang* dan kelurahan serta luas kecamatan adalah sebagai berikut :



Tabel. 2. Pembagian wilayah Kabupaten Tana Toraja

No	Kecamatan	Jumlah <i>Lembang</i>	Jumlah Kelurahan	Luas (KM <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kab. (%)
01	Bonggakaradeng	5	1	206,76	10,06
02	Simbuang	5	1	194,82	9,48
03	Rano	5	-	89,43	4,35
04	Mappak	5	1	166,02	8,08
05	Mengkendek	13	4	196,74	9,58
06	Gandang Batu Sillanan	9	3	108,63	5,29
07	Sangalla	3	2	36,24	1,76
08	Sangalla Selatan	4	1	47,80	2,33
09	Sangalla Utara	4	2	27,96	1,36
10	Makale	1	14	39,75	1,93
11	Makale Selatan	4	4	61,70	3,00
12	Makale Utara	-	5	26,08	1,27
13	Saluputti	8	1	87,54	4,26
14	Bittuang	14	1	163,27	7,95
15	Rembon	11	2	134,47	6,55
16	Masanda	8	-	134,77	6,56
17	Malimbong Balepe	5	1	211,47	10,29
18	Rantetayo	3	3	60,35	2,94
19	Kurra	5	1	60,50	2,94
Total		112	47	2.054,30	100,00

Sumber : Badan Pertanahan Nasional dan BPS, Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010

Ibukota Kabupaten Tana Toraja terletak sekitar 329 km arah Utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Tana Toraja adalah ikon budaya dan pariwisata di Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daya tarik industri pariwisata Indonesia, hal ini merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja.

### b. Demografi

Keadaan demografi penduduk Kabupaten Tana Toraja secara jelas digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. 3. Kondisi Demografi

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km2)	Kepadatan
1.	Bonggakaradeng	7.021	206,76	34
2.	Simbuang	6.309	194,82	32
3.	Rano	6.182	89,43	69
4.	Mappak	5.696	166,02	34
5.	Mengkendek	27.756	196,74	141
6.	Gandang Batu Sillanan	19.686	108,63	181
7.	Sangalla	6.759	36,24	187
8.	Sangalla Selatan	7.533	47,80	158
9.	Sangalla Utara	7.498	27,96	268
10.	Makale	34.415	39,75	866
11.	Makale Selatan	12.703	61,70	206
12.	Makale Utara	12.104	26,08	461
13.	Saluputti	7.596	87,54	87
14.	Bittuang	14.736	163,27	90
15.	Rembon	18.501	134,47	138
16.	Masanda	6.428	134,77	48
17.	Malimbong Balepe	9.130	211,47	43
18.	Rantetayo	10.987	60,35	182
19.	Kurra	5.267	60,50	87
Jumlah		226.212	2.054,30	110

Sumber: BPS Kab. Tana Toraja 2013

### c. Potensi Ekonomi

Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan sehingga sangat potensial untuk kegiatan sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Daerah aliran sungai (DAS) di Tana Toraja tergolong banyak yang didominasi oleh sungai Saddang dengan panjang sekitar 182 km dengan lebar rata-rata 80 m serta memiliki anak sungai sebanyak 294, sangat sesuai untuk

kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat pada sektor agraris. Di samping itu, terdapat potensi ekonomi yang lain yakni, pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan pertambangan.

## **2. Visi dan Misi Dinas Pengelolalan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja**

### **a. Visi**

Visi: Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja guna mendukung pelayanan pemerintah dan pembangunan yang bersih, berkualitas, propesional dan akuntabel.

### **b. Misi:**

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana
- 5) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber-sumber pendapatan daerah
- 6) Meningkatkan administrasi pengelolaan keuangan daerah
- 7) Meningkatkan kinerja pengalokasian belanja daerah secara efisien, efektif dan transparan berdasarkan skala prioritas.
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah
- 9) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah

10) Meningkatkan konsultasi terhadap sumber-sumber penerimaan  
keuangan daerah

c. Rekapitulasi Penerimaan RPH Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015

Tabel 4. Rekapitulasi Penerimaan RPH Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015

No.	Kecamatan	Krb	Babi	Sapi	Kuda	P/A	Jumlah	
1.	Makale	436	2.736	-	-	1.075	Rp	302.850.000
2.	Makale Selatan	73	356	-	-	213	Rp	44.040.000
3.	Makale Utara	320	1.819	-	-	644	Rp	203.745.000
4.	Sangalla'	145	590	-	-	261	Rp	73.830.000
5.	Sangalla' Selatan	94	229	-	-	84	Rp	33.795.000
6.	Sangalla' Utara	219	628	-	-	335	Rp	90.000.000
7.	Mengkendek	205	1.408	-	-	590	Rp	154.050.000
8.	Gandangbatu Sillanan	158	764	1	-	977	Rp	110.410.000
9.	Rantetayo	537	2.010	-	-	752	Rp	253.860.000
10.	Rembon	413	1.549	-	-	1.289	Rp	216.795.000
11.	Saluputti	292	1.225	-	-	1.036	Rp	166.755.000
12.	Bittuang	250	893	-	-	445	Rp	177.825.000
13.	Kurra	172	642	-	-	172	Rp	79.110.000
14.	Bonggakaradeng	89	373	-	-	691	Rp	62.050.000
15.	Malimbong Balepe	200	727	-	-	518	Rp	100.065.000
16.	Simbuang	81	728	-	-	-	Rp	66.750.000
17.	Masanda	34	336	-	-	156	Rp	34.980.000
18.	Rano	73	219	12	5	839	Rp	53.970.000
19.	Mappak	-	-	-	-	-	Rp	-
Jumlah Total		3.791	17.232	13	5	10.077	Rp	2.164.885.000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015

### **3. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja**

#### **a. Sejarah Terbentuknya**

Rembon yang berarti tempat pembuangan karena daerah ini adalah tempat pembuangan bagi mereka yang melanggar adat/norma yang berlaku di masyarakat untuk diasingkan dari lingkungan masyarakat, sehingga menjadi sebuah kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan Rembon, yang ibukota kecamatannya terletak di Kelurahan Talion. Kecamatan Rembon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000.

#### **b. Letak Geografi**

##### **1) Luas Wilayah**

Kecamatan Rembon terletak di Kelurahan Talion yang memiliki luas wilayah 134,47 Km<sup>2</sup> dengan Koordinat Geografis berada pada 3°5'9" LS dan 119°48'3" BT.

##### **2) Batas Wilayah dibatasi :**

- Sebelah Utara : Kecamatan Rantetayo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Makale Selatan
- Sebelah Timur : Kecamatan Makale Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Malimbong Balepe, Kecamatan Bonggakaradeng

##### **3) Topografi**

Kecamatan Rembon yang keadaan wilayahnya terdiri dari pegunungan mempunyai jarak tempuh 17 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten.

c. Jumlah Kelurahan dan *Lembang*

Secara administratif Kecamatan Rembon terdiri dari 2 Kelurahan dan 11

*Lembang*, sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Talion
- 2) Kelurahan Rembon
- 3) *Lembang* Buri'
- 4) *Lembang* Limbong
- 5) *Lembang* Sarapeang
- 6) *Lembang* To'Pao
- 7) *Lembang* Kayu Osing
- 8) *Lembang* Maroson
- 9) *Lembang* Ullin
- 10) *Lembang* Banga
- 11) *Lembang* Palesan
- 12) *Lembang* Batu Sura'
- 13) *Lembang* Bua' Tarrung

d. Komposisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Rembon keadaan 28 Februari 2010 tercatat 20.348 jiwa, terdiri dari laki-laki 10.174 jiwa dan perempuan 10.174 jiwa.

e. Penerimaan RPH Kecamatan Rembon Tahun 2015

Kecamatan Rembon merupakan salah satu penyumbang terbesar retribusi RPH untuk PAD Kabupaten Tana Toraja. Total penerimaan retribusi RPH Kecamatan Rembon pada tahun 2015 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Penerimaan Retribusi RPH Kecamatan Rembon Tahun 2015

No.	Bulan	Penerimaan
1.	Januari	Rp. 13.470.000
2.	Februari	Rp. 10.215.000
3.	Maret	Rp. 9.690.000
4.	April	Rp. 7.695.000
5.	Mei	Rp. 5.985.000
6.	Juni	Rp. 17.325.000
7.	Juli	Rp. 45.105.000
8.	Agustus	Rp. 7.125.000
9.	September	Rp. 15.570.000
10.	Oktober	Rp. 8.640.000
11.	November	Rp. 7.830.000
12.	Desember	Rp. 68.145.000
Total		Rp. 216.795.000

Sumber: Bendahara Penerima RPH Kecamatan Rembon

## B. Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yakni berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan serta dokumen lain yang menunjang

penelitian ini. Data yang disajikan erat kaitannya dengan fokus yang diteliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja melalui pengambilan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), kantor Kecamatan Rembon dan Desa (*Lembang*) Batusura’.

Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD Bapak Leksi, SE., Camat Kecamatan Rembon Bapak Welem Bala*Lembang*, SP., Bendahara Penerima RPH Kecamatan Rembon Bapak Daud Saranga’, Kepala *Lembang* Batusura’ Bapak Farel A. R., Kepala Dusun Tosik *Lembang* Batusura Bapak Andarias Dalame, Kepala RK Panambu *Lembang* Batusura’ Bapak Marten Palangiran, kolektor RPH *Lembang* Limbong Bapak Kadir Pasila dan Oktaviani Misi, SE dan Marten Bontong sebagai masyarakat.

Acuan yang digunakan untuk mengukur implementasi RPH dalam penelitian ini berdasarkan pada indikator implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III (dalam Agustino, 2012: 149) yang terdiri dari komunikasi (transmisi, kejelasan dan konsistensi), sumber daya (staf, informasi, wewenang dan fasilitas), disposisi (pengangkatan dan sikap petugas) dan struktur birokrasi. Data yang diuraikan berdasarkan hasil triangulasi informan yang diwawancarai di lokasi dan tempat yang berbeda yang selanjutnya direduksi berdasarkan data yang diperoleh.

## **1. Implementasi Kebijakan Retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja**

### **a. Komunikasi**

Syarat utama implementasi kebijakan yang efektif adalah implementor mengetahui apa yang harus dikerjakan. Tujuan dari analisis data indikator



komunikasi ini yaitu untuk melihat sejauh mana peraturan RPH dikomunikasikan kepada para petugas dan masyarakat. Terdapat tiga aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dari segi komunikasi, yakni transmisi atau peyaluran, kejelasan dan konsistensi.

#### 1) Transmisi

Aspek transmisi dalam komunikasi sangat penting agar sebuah peraturan dapat dipahami dan tidak menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaannya. Aspek transmisi yang jelas akan memberikan pemahaman yang baik kepada para petugas dan masyarakat tentang kebijakan RPH.

Proses implementasi kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja memiliki proses transmisi yang dimulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan *Lembang* (Desa). Proses transmisi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten setelah kebijakan RPH disahkan berdasarkan Perda Kab. Tana Toraja No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kemudian, masing-masing pihak kecamatan melaksanakan sosialisasi Perda tersebut kepada para aparat *Lembang*. Camat Rembon (wawancara tanggal 3 Juni 2016) mengungkapkan, bahwa “Proses transmisi (penyaluran) Perda yang baru dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dimulai di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan terakhir di tingkat *Lembang*.”<sup>38</sup>

Kemudian Perda yang baru akan ditransmisikan ke pihak *Lembang* oleh petugas DPPKAD bersama dengan petugas Kecamatan. Hal tersebut

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Welem Balalembang, SP, tanggal 3 Juni 2016 di Kantor Kecamatan Rembon.

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bendahara Penerima RPH Kecamatan Rembon, Bapak Daud Saranga' (wawancara tanggal 3 Juni 2016) bahwa, "Proses transmisi sebuah Perda yang baru untuk tingkat *Lembang* dilakukan oleh petugas dari DPPKAD bersama dengan pihak kecamatan dengan mengundang semua elemen pemerintahan, adat dan masyarakat."<sup>39</sup>

Selanjutnya, para Kepala *Lembang* melaksanakan sosialisasi kepada seluruh aparatnya dan masyarakat. Selain itu, Perda tersebut juga disampaikan kepada masyarakat melalui kata sambutan yang dibawakan oleh Kepala *Lembang* dalam kegiatan-kegiatan adat . Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala *Lembang* Batusura' (wawancara tanggal 4 Juni 2016), bahwa "Peraturan Daerah menyangkut RPH biasanya disampaikan kepada masyarakat melalui kata sambutan dalam acara-acara adat."<sup>40</sup>

## 2) Kejelasan

Aspek kejelasan berkaitan dengan proses komunikasi kebijakan retribusi RPH kepada implementor sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berkaitan dengan aspek kejelasan, Kepala *Lembang* Batusura' (wawancara 4 Juni 2016) mengungkapkan bahwa, "Informasi tentang retribusi RPH sudah sangat jelas karena telah diterapkan dari dulu dengan berbagai perubahan yang ada. Di samping itu, para petugas selalu dilengkapi dengan kupon retribusi dalam melaksanakan tugasnya."<sup>41</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dusun Tosik *Lembang* Batusura' Bapak Andarias Dalame (wawancara tanggal 7 Juni 2016), "Kupon

<sup>39</sup> Wawancara dengan Daud Saranga', tanggal 3 Juni 2016 di Kantor Kecamatan Rembon.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Farel A. L., tanggal 4 Juni 2016 di Kantor *Lembang* Batusura'.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Farel A. L., *loc.cit* .

Retribusi yang ada telah memuat jumlah retribusi yang harus dibayar berdasarkan objek retribusi, sehingga memudahkan untuk melakukan penagihan kepada masyarakat”.<sup>42</sup>

### 3) Konsistensi

Aspek konsistensi berkaitan dengan perintah yang diberikan kepada para pelaksana retribusi RPH harus konsisten dan jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam implementasi RPH pihak kecamatan dan *Lembang* memiliki tugas yang berbeda.

Camat Kecamatan Rembon Bapak Welem Balalembang (wawancara tanggal 3 Juni 2016), “Pihak kecamatan memiliki tugas untuk menagih retribusi pemotongan hewan kerbau dan tugas pengawasan di lapangan untuk acara adat dengan pemotongan kerbau di atas 5 ekor.”<sup>43</sup>

Ketua Rukun Keluarga (RK) Dusun Panambu, *Lembang* Batusura Kecamatan Rembon Bapak Marten Palangiran menyampaikan bahwa (wawancara tanggal 6 Juni 2016),

“Kolektor RPH *Lembang* dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua RK memiliki tugas untuk menagih retribusi RPH di luar pemotongan hewan ternak kerbau yakni retribusi pemotongan babi, kambing dan retribusi bentuk lainnya yang disamakan dengan hewan (amplop dan *pa'piong* atau masakan khas Toraja dari daging babi yang dimasak dalam bambu).”<sup>44</sup>

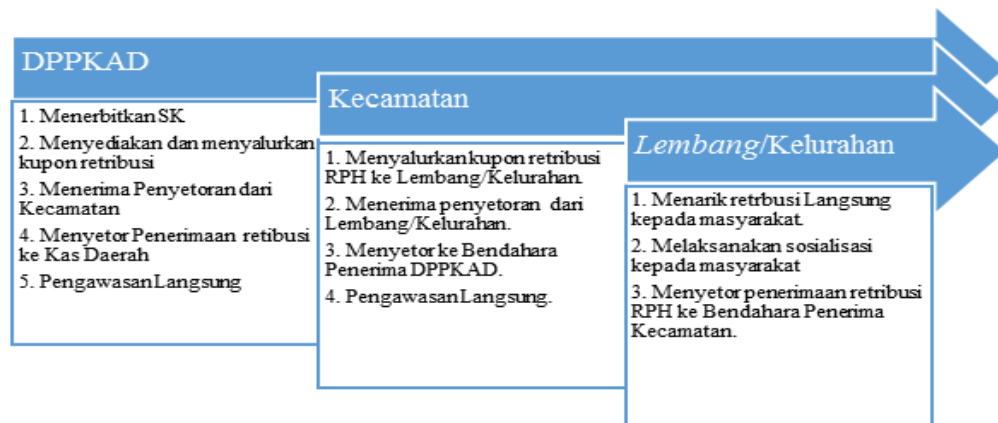
Dalam tata cara penyaluran, penagihan dan penyeteran RPH pihak Kecamatan dan *Lembang* memiliki tugas yang berbeda, sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut:

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Andarias Dalame, tanggal 7 Juni 2016 di Tosik.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Welem Balalembang, *loc.cit.*

<sup>44</sup> Wawancara dengan Marten Palangiran, tanggal 6 Juni 2016 di Panambu.



Gambar 2. Penjabaran Tugas dalam Implementasi Retribusi RPH

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tana Toraja

Melalui bagan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tugas antara DPPKAD, Kecamatan dan *Lembang*. Spesifikasi tersebut menunjukkan konsistensi tugas yang berbeda antara instansi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa kemampuan petugas untuk menjalankan tugasnya secara konsisten dengan taat terhadap peraturan yang ada belum berjalan secara optimal. Hal tersebut secara jelas dibahas di dalam indikator sikap petugas dan wewenang.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Sumber daya memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

##### 1) Staf

Staf adalah sumber daya utama dalam implementasi sebuah kebijakan. Jumlah staf yang banyak tidak selalu mempunyai efek positif dalam implementasi sebuah kebijakan. Untuk memperoleh hasil implementasi yang

efektif hal yang paling dibutuhkan adalah kecakapan staf dalam mengimplementasikan kebijakan.

Pada dasarnya petugas yang diberikan wewenang untuk melakukan penagihan RPH di *Lembang* atau Kelurahan berjumlah 1 (satu) orang berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh DPPKAD yang disebut Kolektor RPH. Jumlah tersebut dianggap mampu bertanggung jawab terhadap penagihan retribusi RPH untuk satu *Lembang*/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kolektor RPH dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua Rukun Keluarga (RK) dalam melaksanakan penagihan retribusi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala *Lembang* Batusura' Bapak Farel Allo Rerung (wawancara tanggal 4 Juni 2016), "Pada dasarnya hanya ada satu petugas yang mendapat SK dari DPPKAD atas usul Kepala *Lembang*, tetapi dalam pelaksanaan penagihan RPH di lapangan akan dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua RK".<sup>45</sup>

Hal tersebut senada dengan pendapat Ketua Bidang Anggaran dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Tana Toraja Bapak Leksi SE., (wawancara tanggal 8 Juni 2016) "Untuk masing-masing *Lembang*/Kelurahan DPPKAD akan meminta 1 (satu) nama untuk diterbitkan SK sebagai Kolektor RPH *Lembang*/Kelurahan".<sup>46</sup>

Untuk memperoleh hasil implementasi kebijakan retribusi RPH yang efektif dibutuhkan petugas yang mampu bertanggung jawab. Petugas yang

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Farel A.L., *loc. cit*

<sup>46</sup> Wawancara dengan Leksi, S.E., tanggal 8 Juni 2016 di Kantor DPPKAD Makale

dipilih hendaknya memiliki kecakapan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan bijak tanpa membedakan.

## 2) Informasi

Informasi mengenai cara melaksanakan suatu kebijakan sangat dibutuhkan oleh para implementor agar sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau peraturan teknis pelaksanaan kebijakan harus diketahui oleh para implementor kebijakan.

Dalam pengamatan yang dilakukan proses implementasi kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) secara khusus. Informasi mengenai cara pelaksanaan retribusi ini diatur berdasarkan Perda Kabupaten Tana Toraja No. 7 Tahun 2011 disertai dengan Peraturan Bupati. Ketua Bidang Anggaran dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Tana Toraja Bapak Leksi SE., (wawancara tanggal 8 Juni 2016) menegaskan bahwa, “Proses pelaksanaan retribusi RPH tidak perlu membutuhkan SOP khusus karena telah diatur dengan jelas dalam Perda mengenai besaran retribusi yang ada serta penggunaan pos retribusi.”<sup>47</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala *Lembang Batusura* Bapak Farel A.L. (wawancara tanggal 4 Juni 2016), bahwa “Masyarakat Tana Toraja telah mengetahui mengenai kewajiban yang harus dibayar untuk setiap pemotongan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Leksi, S.E., *loc.cit.*

hewan yang dilakukan dalam kegiatan adat sehingga peraturan ini tidak lagi harus menggunakan SOP khusus”<sup>48</sup>.

Untuk memperoleh hasil implementasi yang optimal dibutuhkan informasi pelaksanaan yang jelas berdasarkan aturan tertentu. Tersedianya informasi pelaksanaan kebijakan yang jelas akan membantu para implementor untuk melaksanakan tugasnya. Informasi mengenai prosedur penyetoran hasil retribusi telah diatur dalam Perda Kabupaten Tana Toraja No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Selain itu, informasi mengenai pengembalian penerimaan retribusi RPH selalu ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja. Dengan demikian, SOP untuk implementasi kebijakan retribusi RPH telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Tana Toraja.

### 3) Wewenang

Wewenang merupakan hal penting yang harus diketahui oleh implementor sebuah kebijakan. Untuk memperoleh hasil implementasi kebijakan yang efektif dibutuhkan kemampuan petugas untuk menjalankan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam implemetasi kebijakan retribusi RPH terdapat tiga instansi yang terlibat dengan wewenang yang berbeda. Ketua Bidang Anggaran dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Tana Toraja Bapak Leksi SE., (wawancara tanggal 8 Juni 2016) mengungkapkan bahwa:

DPPKAD khususnya Bendahara Benda Berharga dan Bendahara Penerima memiliki tugas untuk menyalurkan Kupon Retribusi dan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Farel A.L., *loc. cit.*

menerima setoran retribusi. Selain itu, DPPKAD juga memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengontrol proses pelaksanaan retribusi RPH jika dibutuhkan.<sup>49</sup>

Pihak kecamatan memiliki wewenang menyalurkan kupon retribusi dan pengawasan apabila diperlukan dalam proses implementasi kebijakan retribusi RPH. Bendahara Penerima RPH Kecamatan Rembon, Bapak Daud Saranga' (wawancara tanggal 3 Juni 2016) mengungkapkan bahwa:

Bendahara Penerima Kecamatan memiliki tugas untuk menyalurkan kupon retribusi kepada masing-masing *Lembang/Lurah* sesuai dengan kebutuhan selain kupon pemotongan hewan kerbau, menerima setoran dari Kolektor RPH *Lembang* dan menyetorkan dana retribusi RPH ke Bendahara Penerima DPPKAD.<sup>50</sup>

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Camat Rembon Bapak Welem Balalembang (wawancara tanggal 3 Juni 2016), "Pihak kecamatan bertugas untuk menarik retribusi terhadap pemotongan kerbau dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan upacara adat dengan pemotongan kerbau di atas 5 (lima) ekor".<sup>51</sup>

Kolektor RPH *Lembang/Kelurahan* adalah pihak yang memiliki peran utama terhadap penagihan retribusi RPH. Pihak *Lembang/Kelurahan* memiliki wewenang untuk menagih retribusi RPH langsung kepada masyarakat. Kepala *Lembang Batusura*' Bapak Farel A.L. (wawancara tanggal 4 Juni 2016) menguraikan bahwa:

Kolektor *Lembang* dibantu dengan Kepala Dusun dan Ketua RK adalah pemeran utama dalam implementasi kebijakan retribusi RPH. Mereka dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam menjalankan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Leksi, S.E. *loc. cit.*

<sup>50</sup> Wawancara dengan Daud Saranga'. *loc. cit.*

<sup>51</sup> Wawancara dengan Welem Balalembang, S.P., *loc. cit.*



tugasnya karena mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk melakukan penagihan retribusi untuk .<sup>52</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa para Kolektor *Lembang*/Kelurahan belum mampu menggunakan wewenangnya dengan tegas untuk menagih retribusi dari masyarakat. Oktaviani Misi, SE., (wawancara tanggal 5 Juni 2016) mengungkapkan bahwa “Para petugas biasanya membiarkan masyarakat membayar kurang dari nilai retribusi yang telah ditetapkan.”<sup>53</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Marten Bontong (wawancara tanggal 9 Juni 2016) bahwa “Petugas akan tetap menerima pembayaran meskipun tidak sesuai dengan jumlah yang diminta, tetapi pembayar tidak akan diberikan kupon retribusi”.<sup>54</sup>

Dari data yang diperoleh ditemukan bahwa dalam Upacara Rambu Solo’ pada acara Keluarga Almarhumah Marta Kanan di *Lembang* Batusura’ pada bulan Desember 2015 jumlah amplop yang diterima dalam catatan Keluarga adalah 120 amplop, tetapi yang tercatat dalam Buku Putih DPPKAD hanya sebanyak 66. Data tersebut menunjukkan bahwa petugas belum dapat menjalankan wewenangnya dengan maksimal saat melakukan penagihan retribusi kepada masyarakat sehingga terdapat objek retribusi yang tidak dibayar. Hal demikian terjadi karena ada masyarakat yang tidak melaporkan amplop yang dibawa kepada petugas retribusi dan hanya melaporkan ke pihak keluarga. Selain itu, petugas juga belum mampu melakukan wewenang

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Farel A.L., *loc. cit.*

<sup>53</sup> Wawancara dengan Oktaviani Misi, S.E., tanggal 5 Juni 2016 di Makale.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Marten Bontong, tanggal 9 Juni 2016 di Tappomea.

pengawasannya secara baik. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Rembon Bapak Marten Palangiran (wawancara tanggal 6 Juni 2016) yakni “Petugas belum mampu menggunakan wewenang pengawasannya secara penuh karena terdapat masyarakat yang tidak melaporkan amplop atau *pa'piong* yang dibawa”.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa Kolektor RPH *Lembang* bersama dengan Kepala Dusun dan Ketua RK belum mampu menjalankan wewenangnya dengan tegas kepada masyarakat. Hal tersebut juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran retribusi.

#### 4) Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud dalam kaitannya dengan implementasi retribusi RPH yakni kupon dan pos retribusi. Kupon retribusi yang digunakan selalu diperbaharui setiap tahunnya. Bendahara Penerima RPH Kecamatan Rembon, Bapak Daud Saranga’ (wawancara tanggal 3 Juni 2016) mengungkapkan bahwa “Semua kupon retribusi disalurkan ke *Lembang/Kelurahan* setiap awal tahun dan akan direkap setiap akhir tahun bersama baik kupon yang telah terpakai atau belum.”<sup>56</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Kepala *Lembang* Batusura’ Bapak Farel A.L. (wawancara tanggal 4 Juni 2016), “Kupon disediakan oleh pihak kecamatan dan dibagikan ke *Lembang* sesuai dengan kebutuhan”.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Marten Palangiran, *loc. cit.*

<sup>56</sup> Wawancara dengan Daud Saranga’, *loc. cit.*

<sup>57</sup> Wawancara dengan Farel A.L., *loc. cit.*

Untuk ketersediaan pos retribusi bersifat dikondisikan dari acara adat yang dilaksanakan. Apabila pihak keluarga menghendaki adanya penyambutan tamu dalam rombongan maka akan dibuat pos retribusi. Camat Rembon Bapak Welem Balalembang (wawancara tanggal 3 Juni 2016), “Pos retribusi akan dibuat pada acara adat yang besar di mana keluarga menghendaki penyambutan tamu dalam rombongan.”<sup>58</sup>

Ketersediaan fasilitas dalam pelaksanaan implementasi retribusi RPH akan sangat memudahkan bagi para petugas pelaksana untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

### c. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini merujuk pada pengangkatan dan sikap implementor kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Dibutuhkan petugas yang memiliki sikap yang bertanggung jawab untuk memperoleh hasil implementasi yang efektif.

#### 1) Pengangkatan Kolektor RPH

Dalam pengamatan yang dilakukan, kolektor RPH di *Lembang*/Kelurahan akan dipilih dan diusulkan ke DPPKAD oleh masing-masing Kepala *Lembang* atau Lurah setiap tahunnya, seperti yang diungkapkan oleh Kepala *Lembang* Batusura' Bapak Farel A.L. (wawancara tanggal 4 Juni 2016), “Kepala *Lembang* bertugas untuk memilih dan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Welem Balalembang, *loc. cit.*

mengusulkan satu nama ke DPPKAD untuk mendapatkan SK sebagai Kolektor RPH *Lembang*.”<sup>59</sup>

Kemudian, DPPKAD akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masing-masing Kolektor RPH. Apabila DPPKAD tidak menerima usulan nama yang baru maka secara langsung kolektor tahun sebelumnya akan kembali mendapatkan SK. Ketua Bidang Anggaran dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Tana Toraja Bapak Leksi SE., (wawancara tanggal 8 Juni 2016) mengatakan, bahwa “Pemilihan dan pengusulan nama Kolektor RPH *Lembang*/Kelurahan dilakukan oleh Lurah atau Kepala *Lembang* masing-masing setiap tahunnya. Selanjutnya DPPKAD akan menerbitkan SK untuk masing-masing Kolektor RPH.”<sup>60</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPPKAD No. 2/DPPKAD/II/2015 tentang Penunjukan Pemungut Retribusi RPH dan PBB *Lembang*/Kelurahan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2015 ditemukan bahwa terdapat beberapa nama yang memiliki tugas rangkap sebagai kolektor RPH dan PBB dan telah menjabat dengan waktu yang lama. Bapak Kadir Pasila sebagai salah satu petugas yang mendapatkan tugas rangkap sebagai Kolektor RPH dan PBB *Lembang* Limbong (wawancara tanggal 7 Juni 2016) mengungkapkan, bahwa “Saya telah diberi tugas sebagai kolektor RPH dan PBB selama lebih dari 10 tahun karena di *Lembang* Limbong tidak ada yang bersedia menjalankan tugas tersebut.”<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Farel A.L., *loc. cit.*

<sup>60</sup> Wawancara dengan Leksi S.E., *loc. cit.*

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kadir Pasila, *loc. cit.*

Di tingkat Kecamatan, proses pemilihan petugas untuk mengawasi retribusi RPH secara langsung di lapangan ditentukan berdasarkan kebijakan Camat masing-masing melalui Surat Tugas. Pengawas kecamatan adalah staf di kantor kecamatan yang akan di-rolling untuk melakukan pengawasan. Artinya, semua staf akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk turun melakukan pengawasan retribusi RPH untuk kegiatan adat yang besar. Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Camat Rembon Bapak Welem Balalembang (wawancara tanggal 3 Juni 2016) “Petugas Kecamatan yang diturunkan untuk tugas pengawasan di lapangan akan diberi Surat Tugas dan SPPD sebanyak 2 orang dan biasanya bergantian untuk semua staf di kantor Kecamatan.”<sup>62</sup>

Dari pengamatan yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil wawancara maka dapat dipahami bahwa masing-masing petugas di *Lembang/Kelurahan* dipilih berdasarkan kebijakan masing-masing Kepala *Lembang/Lurah* dan untuk tingkat Kecamatan petugas di-rolling berdasarkan kebijakan Camat.

Untuk memperoleh hasil implementasi yang efektif hendaknya Kolektor RPH di *Lembang/Kelurahan* tidak memiliki tugas rangkap dan tidak menjabat untuk waktu yang lama. Untuk tingkat kecamatan, camat hendaknya memberikan surat tugas kepada staf yang dapat bertindak tegas dalam melakukan pengawasan karena semua staf tidak memiliki ketegasan yang sama dalam pengawasan jika memberlakukan system *rolling*.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Welem Balalembang, *loc. cit.*

## 2) Sikap Kolektor RPH

Sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa sikap kolektor RPH dalam melaksanakan tugasnya belum memuaskan. Kepala Dusun Tosik Lembang Batusura' Bapak Andarias Dalame (wawancara tanggal 7 Juni 2016) mengungkapkan bahwa "Sangat sulit untuk bertindak tegas saat melakukan penagihan kepada masyarakat karena adanya rasa segan untuk menagih masyarakat sendiri. Selain itu, kesadaran untuk membayar retribusi oleh masyarakat masih rendah."<sup>63</sup> Oktaviani Misi, SE mengungkapkan bahwa "Ada petugas yang membiarkan masyarakat membayar tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayar."<sup>64</sup> Hal tersebut akan memberikan hasil retribusi RPH yang tidak optimal.

Adanya rasa segan terhadap masyarakat sendiri membuat petugas tidak dapat bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kolektor RPH dan PBB *Lembang Limbong* Bapak Kadir Pasila (wawancara tanggal 7 Juni 2016) bahwa:

Tidak mudah untuk melaksanakan tugas sebagai Kolektor RPH karena harus berhadapan dengan masyarakat sendiri dalam *Lembang* yang sama. Ada rasa segan untuk bertindak tegas kepada masyarakat yang tidak dapat membayar sesuai dengan ketentuan.<sup>65</sup>

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi dan sikap petugas yang tidak tegas berdampak pada implementasi retribusi yang tidak

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Andarias Dalame, *loc. cit.*

<sup>64</sup> Wawancara dengan Oktaviani Misi S.E., *loc. cit.*

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kadir Pasila. *loc. cit.*

optimal. Untuk itu dibutuhkan sikap yang tegas oleh para petugas untuk hasil implementasi yang baik.

### 3) Pemberian Insentif

Pemberian insentif terhadap petugas merupakan salah satu bagian dari motivasi kerja petugas. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa Kolektor RPH di *Lembang* tidak diberikan insentif dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala *Lembang* Batusura' Bapak Farel A.L. (wawancara tanggal 4 Juni 2016), "Petugas Kolektor RPH tidak diberikan insentif dalam menjalankan tugasnya karena mereka telah memiliki upah rutin dari *Lembang*".<sup>66</sup> Pendapat tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Kolektor RPH dan PBB *Lembang* Limbong Bapak Kadir Pasila (wawancara tanggal 7 Juni 2016), bahwa "Tidak ada pemberian insentif khusus untuk penagihan retribusi RPH."<sup>67</sup>

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Ketua Bidang Anggaran dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Tana Toraja Bapak Leksi SE., (wawancara tanggal 8 Juni 2016) bahwa "Sebenarnya insentif bisa diberikan kepada petugas, tergantung bagaimana anggaran masing-masing *Lembang*/Kelurahan mengenai pengembalian hasil retribusi dialokasikan".<sup>68</sup>

#### d. Struktur birokrasi

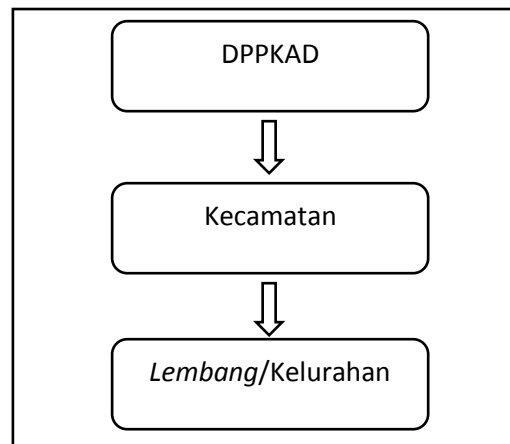
Dari segi struktur birokrasi, penelitian ini difokuskan pada seberapa jauh tingkat koordinasi kebijakan retribusi RPH dari pimpinan sampai petugas retribusi di lapangan sebagaimana yang digambarkan dalam struktur birokrasi yang ada.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Farel A.L., *loc. cit*

<sup>67</sup> Wawancara Kadir Pasila, *loc. cit*

<sup>68</sup> Wawancara dengan Leksi, S.E, *loc. cit*

Secara sederhana struktur birokrasi yang terkait dalam proses implementasi kebijakan retribusi RPH adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Sederhana Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi RPH

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tana Toraja

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa tugas utama DPPKAD dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja adalah menerbitkan SK Kolektor *Lembang/Kelurahan* oleh Kepala DPPKAD. Selanjutnya, Bidang Anggaran dan Penagihan secara khusus memiliki tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja, yakni:

Bidang Penagihan dan Penerimaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja



Selain tugas pokok tersebut, DPPKAD juga memiliki tugas koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi RPH di *Lembang*. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Anggaran dan Penerimaan DPPKAD Kabupaten Tana Toraja Bapak Leksi SE., (wawancara tanggal 8 Juni 2016) bahwa: “DPPKAD melakukan tugas koordinasi dan pengawasan dengan turun langsung pada pos retribusi untuk melakukan pengawasan penagihan retribusi RPH oleh Kolektor *Lembang* untuk kegiatan adat yang besar dengan pemotongan hewan kerbau di atas 9 (Sembilan) ekor.”<sup>70</sup>

DPPKAD juga melakukan koordinasi langsung ke *Lembang* dalam rangka penerbitan SK Kolektor RPH yang diperbaharui setiap tahunnya. Namun, koordinasi tersebut sebatas untuk melengkapi syarat administrasi petugas karena tidak disertai dengan evaluasi sehingga terdapat beberapa nama yang memiliki tugas yang rangkap sebagai Kolektor RPH dan PBB dalam SK yang diterbitkan tanpa adanya tindak lanjut dan klarifikasi dari DPPKAD.

Pihak Kecamatan memiliki tugas penyaluran kupon retribusi RPH, penyeteroran hasil retribusi RPH dan pengawasan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bendahara Penerima RPH Kecamatan Rembon, Bapak Daud Saranga’ (wawancara tanggal 3 Juni 2016), bahwa:

Pihak Kecamatan memiliki tugas koordinasi dalam bentuk penyaluran kupon retribusi ke masing-masing *Lembang*/Kelurahan, penerimaan hasil retribusi dan penyeteroran ke kas daerah, dan tugas pengawasan langsung untuk acara adat dengan pemotongan hewan kerbau di atas 5 (lima) ekor.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Leksi S.E., *loc. cit*

<sup>71</sup> Wawancara dengan Daud Saranga’, *loc. cit*.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Camat Rembon Bapak Welem Balalembang (wawancara tanggal 3 Juni 2016), “Pihak kecamatan memiliki tugas koordinasi langsung dengan turun melakukan pengawasan di pos retribusi untuk kegiatan adat yang besar.”<sup>72</sup>

Berdasarkan pengamatan ditemukan bahwa proses koordinasi mulai dari penerbitan SK, penyaluran kupon retribusi, penyetoran ke kas daerah dan pengawasan langsung memiliki berbagai kendala. Kendala yang terjadi seperti SK yang sudah diterbitkan oleh DPPKAD tidak dimiliki oleh para Kolektor RPH, penyetoran ke kas daerah yang tidak dilaksanakan dalam waktu 2x24 jam sebagaimana yang di atur dalam Perda, serta pengawasan yang hanya dilakukan untuk acara adat yang besar.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja**

Penelitian ini membahas masalah implementasi kebijakan ditinjau dari segi komunikasi (transmisi, kejelasan dan konsistensi), sumber daya (staf, informasi, wewenang, dan fasilitas), disposisi terdiri (pengangkatan birokrat dan insentif) dan struktur birokrasi. Pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai indikator berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Welem Balalembang, *loc. cit.*

a. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu variabel yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Komunikasi berperan dalam menentukan pencapaian tujuan sebuah implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif apabila para pembuat keputusan mengetahui dengan jelas apa yang akan mereka kerjakan.

Terdapat tiga indikator utama yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi dalam penelitian ini, yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi; Transmisi adalah proses penyaluran komunikasi. Transmisi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik; Kejelasan komunikasi bagi pelaksana kebijakan kan menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif, dan sebaliknya; Konsistensi perintah bagi pelaksana kebijakan di lapangan sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan kebingungan.

Proses penyaluran komunikasi atau transmisi yang ada dalam implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja terjadi melalui tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama dimulai dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (DPPKAD), tingkat Kecamatan dan terakhir pada tingkat *Lembang*/Kelurahan. Proses transmisi kebijakan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja terlaksana melalui sosialisasi di tingkat Kabupaten bersama aparat Kecamatan. Kemudian dilakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan untuk aparat *Lembang*. Akhirnya, kebijakan tentang retribusi RPH disosialisasikan oleh masing-masing Kepala

*Lembang* kepada aparatnya masing-masing dan kepada masyarakat salah satunya melalui kata sambutan dalam acara adat.

Proses transmisi tersebut memberikan kejelasan komunikasi bagi para petugas pelaksana dan masyarakat. Dengan demikian, semua petugas mengetahui dengan jelas jumlah retribusi yang harus ditagih kepada masyarakat dan semua masyarakat mengetahui jumlah retribusi yang harus dibayar untuk pemotongan hewan ternak dalam upacara adat di Kabupaten Tana Toraja. Meskipun komunikasi kebijakan retribusi RPH telah diketahui secara luas oleh masyarakat Tana Toraja namun kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi masih rendah.

Proses implementasi kebijakan retribusi RPH melibatkan beberapa petugas terkait yakni Bendahara Benda Berharga DPPKAD, Bendahara Penerima DPPKAD, Bendahara Kecamatan dan Kolektor *Lembang*/Kelurahan bersama dengan Kepala Dusun dan Ketua RK. Spesialisasi tugas tersebut menciptakan konsistensi pelaksanaan tugas dalam implementasi kebijakan retribusi RPH.

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pengamatan komunikasi kebijakan retribusi RPH kepada para petugas pelaksana ditinjau dari aspek transmisi dan kejelasan telah terlaksana secara efektif sesuai dengan pendapat Edwards III (dalam Tahir 2014:62) bahwa “Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus

dilakukannya”.<sup>73</sup> Namun, dalam hal konsistensi belum berjalan secara efektif karena petugas belum mampu menjalankan tugasnya secara konsisten sesuai dengan peraturan yang ada. Keefektifan konsistensi ditentukan oleh pelaksanaan perintah oleh petugas secara tetap sebagaimana yang dituliskan oleh Agustino (2012:151) bahwa “Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan dan dijalankan).”<sup>74</sup>

Dari dua aspek komunikasi yang telah berjalan dengan baik maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan retibusi RPH di Kabupaten Tana Toraja telah berjalan secara efektif. Namun komunikasi terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui tujuan utama retribusi RPH sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk meningkatkan pembangunan.

#### b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel penting untuk memperoleh hasil implementasi yang efektif. Sebuah kebijakan hanya akan menjadi dokumen jika tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakannya. Sebuah kebijakan harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dan didukung oleh sumber daya lainnya. Sumber daya terdiri dari empat indikator utama yakni staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

---

<sup>73</sup> George C. Edwards III dalam Tahir. *loc. cit.*

<sup>74</sup> Agustino. *loc cit.*

Sumber daya manusia (staf) merupakan sumber daya utama dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari DPPKAD jumlah Kolektor RPH untuk masing-masing Lembang/Kelurahan adalah satu orang. Dalam menjalankan tugasnya Kolektor RPH akan dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua RK. Namun, berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa petugas memiliki tugas yang rangkap sebagai Kolektor RPH dan Kolektor PBB. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan optimal petugas hendaknya memiliki spesialisasi tugas.

Selain sumber daya manusia, informasi juga merupakan salah satu sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Informasi dalam pelaksanaan retribusi RPH telah diatur sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2011 dilengkapi dengan Peraturan Bupati. Informasi mengenai jumlah yang harus dibayar, pengambilan kupon retribusi, penyetoran hasil retribusi, pembagian hasil retribusi serta penggunaan pos telah diatur masing-masing. Dengan demikian, penggunaan Standar Operasional Prosedur tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan retribusi RPH.

Indikator selanjutnya yang berkaitan dengan sumber daya adalah wewenang yang dibutuhkan oleh para petugas untuk menjalankan tugasnya. Proses implementasi kebijakan retribusi RPH melalui tiga tingkatan struktur organisasi yakni DPPKAD, Kecamatan dan Lembang. Adanya perbedaan tugas pada masing-masing struktur memberikan wewenang yang berbeda dalam implementasi kebijakan retribusi RPH. Pelaksana utama implementasi kebijakan retribusi RPH adalah kolektor *Lembang/Kelurahan*. Permasalahan

yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan adalah ketidak mampuan petugas untuk menggunakan wewenanganya dengan tegas untuk menagih retribusi kepada masyarakat. Dengan demikian, penagihan retribusi tidak berjalan optimal karena masyarakat membayar tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayar.

Indikator terakhir yang menjadi bagian dari sumber daya adalah fasilitas. Untuk memperoleh hasil implementasi yang optimal dibutuhkan fasilitas sebagai sarana pendukung kelancaran proses. Fasilitas yang terkait dalam implementasi kebijakan retribusi RPH adalah kupon retribusi dan pos retribusi. Kupon retribusi disediakan oleh pihak Kecamatan masing-masing *Lembang/Kelurahan* dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan oleh Bendahara Penerima Kecamatan setiap tahun anggaran baru. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara ditemukan bahwa kupon retribusi RPH tidak diberikan oleh petugas kepada masyarakat yang membayar kurang dari jumlah tagihan retribusi. Kemudian petugas akan mengumpulkan pembayaran yang kurang tersebut, melakukan perhitungan dan mengeluarkan kupon berdasarkan jumlah pembayaran yang ada. Dalam implementasi kebijakan retribusi RPH pengadaan pos retribusi bersifat dikondisikan. Pos retribusi akan diadakan untuk acara adat yang besar.

Indikator keberhasilan sumber daya menurut Agustino (2012:151) yaitu staff yang kompeten, informasi pelaksanaan yang jelas, wewenang formal yang jelas dan fasilitas sebagai sumber daya pendukung yang jelas.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang diperoleh sumber daya yang ada dibutuhkan dalam implementasi retribusi RPH belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal. Staf atau petugas pelaksana yang disebut sebagai Kolektor RPH adalah sumber daya utama yang sangat menentukan keberhasilan retribusi RPH. Selain itu, Kolektor RPH adalah petugas retribusi yang harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kolektor RPH belum mampu menggunakan wewenang dan fasilitas yang ada secara bertanggung jawab meskipun informasi pelaksanaan telah diatur dan diketahui dengan jelas.

c. Disposisi

Tahir menuliskan (2014: 69) bahwa:

Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>76</sup>

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pengangkatan petugas yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Kecenderungan perilaku atau karakteristik seorang implemmentor berperan penting untuk mewujudkan hasil sesuai dengan tujuan. Dengan demikian, pengangkatan petugas dan pemberian insentif hendaknya memperoleh perhatian khusus agar sebuah implementasi sebuah kebijakan dapat terlaksana secara efektif.

---

<sup>76</sup> Tahir, *loc. cit.*



Dalam proses pengangkatan petugas retribusi RPH atau kolektor RPH ditentukan oleh kebijakan Kepala *Lembang* / Lurah. Kepala *Lembang*/Lurah bertanggung jawab untuk menentukan petugas yang dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Setiap tahun, kolektor RPH mendapatkan SK dari DPPKAD atas usul Kepala *Lembang*/Lurah masing-masing. Berdasarkan data dan hasil wawancara diketahui bahwa ada petugas yang telah menjadi Kolektor RPH untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, terdapat beberapa petugas dengan tugas yang rangkap sebagai Kolektor RPH dan Kolektor PBB. Kolektor PBB. Selain itu, petugas yang ada tidak memperoleh insentif dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa disposisi dalam implementasi retribusi RPH dalam kaitannya dengan pengangkatan petugas, sikap petugas dan pemberian insentif belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya petugas yang memiliki tugas yang rangkap serta sikap petugas yang tidak mendukung tercapainya retribusi RPH secara optimal. Selain itu, pemberian insentif kepada para Kolektor RPH dalam menjalankan tugasnya belum terlaksana karena belum diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan. Struktur birokrasi yang ada memuat gambaran mengenai tingkatan koordinasi yang ada sampai kepada implementor. Semakin baik koordinasi yang ada maka hasil implementasi akan semakin baik pula dan sebaliknya.

Proses koordinasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan retribusi RPH terjadi melalui tiga tingkatan. Pertama, koordinasi dilakukan oleh DPPKAD kepada kecamatan melalui penyaluran kupon retribusi dan penerimaan setoran retribusi. Selain itu, DPPKAD juga melakukan koordinasi langsung ke *Lembang*/Kelurahan melalui penerbitan SK Kolektor RPH dan pengawasan langsung untuk kegiatan adat dengan syarat tertentu. Kedua, koordinasi dilakukan oleh pihak Kecamatan ke *Lembang*/Kelurahan melalui penyaluran kupon retribusi dan penarikan retribusi langsung untuk pemotongan hewan kerbau, pengawasan langsung, penerimaan setoran retribusi dari Kolektor RPH *Lembang*/Kelurahan, penyetoran ke Bendahara Penerima DPPKAD, dan pengawasan langsung. Ketiga, Kepala *Lembang*/Lurah akan melakukan koordinasi langsung kepada Kolektor RPH bersama dengan Kepala Dusun dan Ketua RK untuk melakukan penagihan retribusi RPH kepada masyarakat untuk setiap acara adat yang disertai dengan pemotongan hewan ternak.

Agustino (2012: 153) menuliskan bahwa “Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.”<sup>77</sup> Struktur birokrasi yang terkait dalam implementasi kebijakan retribusi RPH pada dasarnya telah melakukan koordinasi yang baik. Namun, koordinasi dan pengawasan terhadap petugas di lapangan belum terlaksana maksimal

---

<sup>77</sup> Agustino, *loc.cit.*

sehingga ada petugas yang bersikap tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja dengan studi kasus di Kecamatan Rembon, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja dengan studi kasus di Kecamatan Rembon berdasarkan 4 fokus penelitian yakni komunikasi (transmisi, kejelasan dan konsistensi), sumber daya (staf, informasi, fasilitas dan wewenang), disposisi (pengangkatan petugas, sikap petugas dan insentif) dan struktur birokrasi belum berjalan secara optimal. Namun demikian 2 indikator telah menunjukkan hasil yang baik yakni komunikasi dalam aspek transmisi dan kejelasan serta struktur birokrasi.

#### **B. Implikasi**

Hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja merupakan bukti ilmiah akan pentingnya implementasi kebijakan retribusi yang efektif untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa jumlah pencapaian retribusi yang melampaui target tidak menjadi jaminan implementasi yang efektif dan efisien. Dibutuhkan petugas yang mampu bertanggung jawab dalam menjalankan, evaluasi kinerja petugas dan pengawasan yang optimal untuk meningkatkan proses implementasi di lapangan.

### **C. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pengadaan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat oleh instansi yang terkait mengenai pentingnya pembayaran retribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk semakin meningkatkan pembangunan daerah.
2. Kolektor RPH dan petugas pengawas hendaknya orang yang memiliki sikap yang tegas dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
3. Pengadaan seminar atau kegiatan peningkatan kecakapan Kolektor RPH secara rutin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humaika
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. SUN
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya: cv. Putra Media Nusantara
- Nugroho, Rian. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Purwanto, Sulistiastuty. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Alfabeta
- Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

### Skripsi

- Suryadinata, Alfon. 2013. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemotongan Kerbau Akibat Kenaikan Retribusi di Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin

Yances, Aderaty. 2013. Analisis Sistem Pengendalian Intrn (SPI) Dalam System Akuntansi Penerimaan Retribusi Potong Hewan Pada Upacara Adat Toraja Utara. *Skripsi*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Perda Kabupaten Tana Toraja No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

### **Sumber Lain**

Dinas Pendapatan Kabupaten Tana Toraja. 2015. *Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011-2014*. Kabupaten Tana Toraja.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. *Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah 2013*.

LAMPİRAN



## Lampiran 1

**MATRIKS PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)**  
**DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Fokus	Sumber Data	Metode Penelitian
Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Tana Toraja	Bagaimanakah implementasi kebijakan Retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja	Implementasi	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	1. Data Primer, berasal dari informan: a. Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD (Bpk. Leksi, SE.) b. Camat Kecamatan Rembon (Welem Balalembang, SP) c. Kolektor RPH Kecamatan Rembon (Daud Saranga') d. Kepala Lembang Batusura' (Farel A. R.) e. Kepala Dusun Tosik Lembang Batusura' (Andarias Dalame) f. Ketua RK Panambu, Lembang Batusura'	1. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain penelitian yaitu kualitatif 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi

				(Bapak Martinus Palangiran) g. Kolektor RPH Lembang Talion (Kadir P.) h. Oktaviani Misi, SE. i. Marten Bontong 2. Data Sekunder	
--	--	--	--	--	--

## Lampiran 2

**MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)**  
**DI KABUPATEN TANA TORAJA**

<b>Fokus</b>	<b>Sub Fokus</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>
Implementasi kebijakan retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Di Kabupaten Tana Toraja	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah proses transmisi retribusi RPH kepada petugas dan masyarakat?</li> <li>2. Apakah komunikasi retribusi RPH telah dilakukan memenuhi aspek kejelasan?</li> <li>3. Apakah komunikasi retribusi RPH telah memenuhi aspek konsistensi bagi para petugas?</li> </ol>	Farel Allo Lembang Andarias Dalame Welem Balalembang, SP. Marten Palangiran Daud Saranga'
	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kecukupan dan kualifikasi kolektor RPH?</li> <li>2. Apakah petugas menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan informasi pelaksanaan yang diatur dalam Perda?</li> <li>3. Apakah petugas bekerja sesuai dengan wewenangnya masing-masing?</li> <li>4. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana petugas dalam melaksanakan tugasnya, seperti pos dan kupon?</li> </ol>	Farel Allo Rerung Leksi, SE. Welem Balalembang, SP. Daud Saranga' Oktaviani Misi, SE. Marten Bontong

	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tahapan pengangkatan petugas retribusi RPH?</li> <li>2. Bagaimana sikap petugas menghadapi masyarakat yang tidak taat membayar retribusi RPH?</li> <li>3. Apakah petugas mendapatkan insentif dalam menjalankan tugasnya?</li> </ol>	<p>Farel Allo Rerung</p> <p>Leksi, SE.</p> <p>Welem Balalembang, SP.</p> <p>Kadir Pasila</p> <p>Andarias Dalame</p> <p>Oktaviani Misi, SE</p> <p>Marten Bontong</p>
	Struktur Birokrasi	Bagaimanakah peran struktur birokrasi yang ada untuk memaksimalkan implementasi kebijakan retribusi RPH ditinjau dari segi koordinasi?	<p>Leksi, SE.</p> <p>Daud Saranga'</p> <p>Welem Balalembang</p>

## Lampiran 3

**DAFTAR NAMA INFORMAN**

## Informan Pertama

Nama : Leksi, SE.

Status : Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan DPPKAD

## Informan Kedua

Nama : Welem Balalembang, SP.

Status : Camat Kecamatan Rembon

## Informan Ketiga

Nama : Daud Saranga'

Status : Bendahara Penerima RPH Kecamatan Rembon

## Informan Keempat

Nama : Farel A. R.

Status : Kepala Lembang Batusura'

## Informan Kelima

Nama : Andarias Dalame

Status : Kepala Dusun Tosik *Lembang* Batusura

## Informan Keenam

Nama : Marten Palangiran

Status : Kepala RK Panambu *Lembang* Batusura'

## Informan Ketujuh

Nama : Kadir Pasila

Status : Kolektor RPH *Lembang* Limbong

Informan Kedelapan

Nama : Oktaviani Misi, SE.

Status : Masyarakat

Informan Kesembilan

Nama : Marten Bontong

Status : Masyarakat

## Lampiran 4

**MATRIKS DATA HASIL WAWANCARA**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)**  
**DI KABUPATEN TANA TORAJA**

<b>Fokus/Sub Fokus</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Informan</b>	<b>Reduksi Data</b>
Komunikasi	1. Bagaimanakah proses transmisi retribusi RPH kepada petugas dan masyarakat?	Proses transmisi (penyaluran) Perda yang baru dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dimulai di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan terakhir di tingkat <i>Lembang</i> .	Welem Balalembang, SP	Perda yang baru akan disosialisasikan di tingkat Kabupaten dan selanjutnya akan di lanjutkan di tingkat Kecamatan.
		Proses transmisi sebuah Perda yang baru untuk tingkat <i>Lembang</i> dilakukan oleh petugas dari DPPKAD bersama dengan pihak kecamatan dengan mengundang semua elemen pemerintahan, adat dan	Daud Saranga'	Proses transmisi Perda yang dilakukan di tingkat <i>Lembang</i> dilaksanakan secara langsung oleh petugas DPPKAD bersama dengan pihak kecamatan.

		masyarakat.		
		Peraturan Daerah menyangkut RPH biasanya disampaikan dan ditekankan kepada masyarakat melalui kata sambutan dalam acara- acara adat.	Farel Allo Lembang	Sosialisasi oleh pihak Lembang dapat dilakukan melalui kata sambutan Kepala Lembang dalam acara- acara adat.
	2. Apakah komunikasi retribusi RPH telah dilakukan memenuhi aspek kejelasan?	Informasi tentang retribusi RPH sudah sangat jelas karena telah diterapkan dari dulu dengan berbagai perubahan yang ada. Di samping itu, para petugas selalu dilengkapi dengan kupon retribusi dalam melaksanakan tugasnya.	Farel Allo Lembang	Aspek kejelasan tentang retribusi RPH kepada Masyarakat dan petugas sudah baik karena retribusi RPH telah diberlakukan dari dulu.
		Kupon Retribusi yang ada telah memuat jumlah retribusi yang harus dibayar berdasarkan objek retribusi, sehingga memudahkan untuk melakukan penagihan	Andarias Dalame	Kupon retribusi memiliki fungsi untuk memperjelas jumlah yang harus dibayar oleh masyarakat.



	3. Apakah komunikasi retribusi RPH telah memenuhi aspek konsistensi bagi para petugas?	<p>kepada masyarakat.</p> <p>Pihak kecamatan memiliki tugas untuk menagih retribusi pemotongan hewan kerbau dan tugas pengawasan di lapangan untuk acara adat dengan pemotongan kerbau di atas 5 ekor.</p> <p>Kolektor RPH Lembang dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua RK memiliki tugas untuk menagih retribusi RPH di luar pemotongan hewan ternak kerbau, karena itu adalah tugas pihak Kecamatan.</p>	<p>Welem Balalembang, SP.</p> <p>Marten Palangiran</p>	<p>Pihak Kecamatan memiliki tugas untuk melakukan penagihan retribusi terhadap pemotongan hewan kerbau.</p> <p>Kolektor Lembang dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua RK bertugas untuk menarik retribusi kepada masyarakat di luar retribusi hewan ternak kerbau.</p>
Sumber Daya	1. Bagaimana kecukupan dan kualifikasi staf sebagai kolektor RPH?	Pada dasarnya hanya ada satu petugas yang mendapat SK dari DPPKAD atas usul Kepala Lembang, tetapi dalam pelaksanaan penagihan RPH di	Farel Allo Rerung	Berdasarkan SK dari DPPKAD jumlah Kolektor Lembang yakni 1 (satu) orang untuk masing-masing Lembang dan dibantu oleh Kepala Dusun dan Ketua RK.



		kegiatan adat sehingga peraturan ini tidak lagi harus menggunakan SOP khusus.		ternak pada acara adat sehingga SOP tidak lagi diperlukan.
		DPPKAD khususnya Bendahara Benda Berharga dan Bendahara Penerima memiliki tugas untuk menyalurkan Kupon Retribusi dan menerima setoran retribusi. Selain itu, DPPKAD juga memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengontrol proses pelaksanaan retribusi RPH jika dibutuhkan.	Leksi, SE.	Bendahara Benda Berharga dan Bendahara Penerima DPPKAD memiliki tugas penyaluran kupon ke pihak Kecamatan dan penerimaan setoran retribusi. DPPKAD juga memiliki tugas evaluasi dan kontrol terhadap proses pelaksanaan retribusi RPH.
	3. Apakah petugas bekerja sesuai dengan wewenangnya masing-masing?	Bendahara Penerima Kecamatan memiliki tugas untuk menyalurkan kupon retribusi kepada masing-masing Lembang/Lurah sesuai dengan kebutuhan selain kupon pemotongan hewan kerbau, menerima setoran retribusi dari	Daud Saranga'	Bendahara Penerima Kecamatan memiliki tugas untuk menyalurkan kupon retribusi RPH ke pihak Lembang kecuali kupon retribusi pemotongan hewan kerbau, menerima setoran retribusi dari

		<p>setoran dari Kolektor RPH Lembang dan menyetorkan dana retribusi RPH ke Bendahara Penerima DPPKAD.</p> <p>Kolektor Lembang dibantu dengan Kepala Dusun dan Ketua RK adalah pemeran utama dalam implementasi kebijakan retribusi RPH. Mereka dituntut untuk dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk melakukan penagihan retribusi.</p> <p>Para petugas biasanya membiarkan masyarakat membayar kurang dari nilai retribusi yang telah ditetapkan.</p>	<p>Farel Allo Rerung</p> <p>Oktaviani Misi, SE.</p>	<p>Kolektor Lembang dan meyetorkan dana retribusi RPH ke Bendahara Penerima DPPKAD.</p> <p>Kolektor RPH Lembang bersama dengan Kepala Dusun dan Ketua RK adalah penanggung jawab utama atas penagihan retribusi kepada masyarakat.</p> <p>Petugas belum mampu menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menagih retribusi sesuai</p>
--	--	---	---	---

		Petugas akan tetap menerima pembayaran meskipun tidak sesuai dengan jumlah yang diminta, tetapi pembayar tidak akan diberikan kupon retribusi.	Marten Bontong	ketentuan.  Pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang ditagih tetap diterima oleh petugas dan tidak disertai dengan pemberina kupon retribusi.
	4. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana petugas dalam melaksanakan tugasnya, seperti pos dan kupon?	Semua kupon retribusi disalurkan ke Lembang/Kelurahan setiap awal tahun dan akan direkap setiap akhir tahun bersama baik kupon yang telah terpakai atau belum.	Daud Saranga'	Kupon retribusi disalurkan ke Lembang/Kelurahan setiap awal tahun dan akan direkap setiap akhir tahun.
		Kupon disediakan oleh pihak kecamatan dan dibagikan ke Lembang sesuai dengan kebutuhan.	Farel Allo Rerung	Kupon retribusi telah disediakan oleh pihak Kecamatan dan disalurkan ke Lembang sesuai dengan kebutuhan.
		Pos retribusi akan dibuat pada acara adat yang	Welem Balalembang, SP.	Pos retribusi akan dibuat hanya untuk acara adat

		besar di mana keluarga menghendaki penyambutan tamu dalam rombongan.		yang besar dengan penerimaan tamu melalui rombongan.
Disposisi	1. Bagaimana tahapan pengangkatan petugas Kolektor RPH?	<p>Kepala Lembang bertugas untuk memilih dan mengusulkan satu nama ke DPPKAD untuk mendapatkan SK sebagai Kolektor Lembang.</p> <p>Pemilihan dan pengusulan nama Kolektor RPH Lembang/Kelurahan dilakukan oleh Lurah atau Kepala Lembang masing-masing setiap tahunnya. Selanjutnya DPPKAD akan menerbitkan SK untuk masing-masing Kolektor RPH.</p>	<p>Farel Allo Rerung</p> <p>Leksi, SE.</p>	<p>Kepala Lembang memiliki tugas untuk memilih dan mengusulkan nama ke DPPKAD untuk selanjutnya diterbitkan SK sebagai Kolektor RPH Lembang.</p> <p>Kolektor RPH Lembang/Kelurahan ditentukan oleh Lembang/Lurah masing-masing yang selanjutnya akan diterbitkan SK oleh DPPKAD.</p>

		<p>Petugas Kecamatan yang diturunkan untuk tugas pengawasan di lapangan akan diberi Surat Tugas dan SPPD sebanyak 2 orang dan biasanya bergantian untuk semua staf di kantor Kecamatan.</p> <p>Saya telah diberi tugas sebagai kolektor RPH dan PBB selama lebih dari 10 tahun karena di Lembang Limbong tidak ada yang bersedia menjalankan tugas tersebut.</p> <p>Sangat sulit untuk bertindak tegas saat melakukan penagihan kepada masyarakat karena adanya rasa segan untuk menagih masyarakat sendiri. Selain itu, kesadaran untuk membayar retribusi oleh masyarakat masih</p>	<p>Welem Balalembang, SP.</p> <p>Kadir Pasila</p> <p>Andarias Dalame</p>	<p>Pegawai di Kantor Kecamatan akan bergantian melakukan tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari Camat disertai dengan SPPD.</p> <p>Pemilihan Kolektor RPH haruslah pihak yang bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>Petugas tidak dapat bertindak tegas karena adanya rasa segan menghadapi masyarakat sendiri.</p>
--	--	---	--	--





	3. Apakah petugas mendapatkan insentif dalam menjalankan tugasnya?	<p>Tidak ada pemberian insentif khusus untuk penagihan retribusi RPH.</p> <p>Sebenarnya insentif bisa diberikan kepada petugas, tergantung bagaimana anggaran masing-masing <i>Lembang/Kelurahan</i> mengenai pembagian hasil retribusi dialokasikan.</p>	<p>Kadir Pasila</p> <p>Leksi, S.E.</p>	<p>Tidak ada insentif khusus.</p> <p>Insentif dapat diberikan jika sebelumnya telah diatur.</p>
Struktur Birokrasi	Bagaimanakah peran struktur birokrasi yang ada untuk memaksimalkan implementasi kebijakan retribusi RPH ditinjau dari segi koordinasi?	<p>DPPKAD melakukan tugas koordinasi dan pengawasan dengan turun langsung pada pos retribusi untuk melakukan pengawasan penagihan retribusi RPH oleh Kolektor Lembang untuk kegiatan adat yang besar dengan pemotongan hewan kerbau di atas 9 (Sembilan) ekor.</p> <p>Pihak Kecamatan memiliki tugas koordinasi dalam bentuk penyaluran</p>	<p>Leksi, SE.</p> <p>Daud Saranga'</p>	<p>DPPKAD melakukan koordinasi langsung dalam pengawasan terhadap penagihan retribusi RPH di pos retribusi untuk kegiatan adat yang besar.</p> <p>Pihak Kecamatan melaksanakan koordinasi dalam bentuk penyaluran</p>

		<p>kupon retribusi ke masing-masing Lembang/Kelurahan, penerimaan hasil retribusi dan penyetoran ke kas daerah, dan tugas pengawasan langsung untuk acara adat dengan pemotongan hewan kerbau di atas 5 (lima) ekor.</p> <p>Pihak kecamatan memiliki tugas koordinasi langsung dengan turun melakukan pengawasan di pos retribusi untuk kegiatan adat yang besar.</p>	<p>Welem Balalembang</p>	<p>kupon retribusi, penerimaan dan penyetoran ke kas daerah serta tugas pengawasan langsung.</p> <p>Pihak kecamatan dapat melakukan koordinasi langsung melalui pengawasan di pos retribusi untuk kegiatan adat yang besar.</p>
--	--	---	--------------------------	---

## Lampiran 5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
Alamat. Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105  
Website : <http://ian.unm.ac.id>

---

PERSETUJUAN JUDUL DAN CALON PEMBIMBING

---

## A. IDENTITAS

1. Nama : MARSELINUS DASMAR LURON  
2. Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 06 Maret 1993  
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265141026  
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

## B. JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI

**"Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja."**

## 6. PEMBIMBING YANG DITUNJUK

No.	Nama Pembimbing/NIP	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si NIP.19641111 198903 2 001	1.
2	Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si NIP.19510925 197602 1 001	2.

Makassar, 20 Jan 2016

Ketua Program Studi  
Ilmu Adm. Negara FIS UNM

Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si  
NIP. 19601231 198803 1 001

## Lampiran 6



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
Alamat. Jl. AP. Pettarani Makassar Telp. 885105 fax 885105  
Website : <http://ian.unm.ac.id>

## USUL PROPOSAL PENELITIAN/PENULISAN SKRIPSI

## A. IDENTITAS

1. Nama : MARSELINUS DASMAR LURON
2. Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 06 Maret 1993
3. Nomor Induk Mahasiswa : 1265141026
4. Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
5. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

## B. FOKUS PENELITIAN

- ☒ Kebijakan Publik  
☐ Pelayanan Publik  
☐ Administrasi Pembangunan

## C. JUDUL SKRIPSI YANG DIUSULKAN

1. Implementasi <sup>Kebijakan</sup> Retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja.
2. Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja.
3. Efektivitas Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja.

Makassar, 13 Mei 2015

Diketahui Oleh:

Penasehat Akademik,

Dra. Hj. Herlina Sakawati, M. Si  
NIP. 19641111 198903 2 001

Mahasiswa yang bersangkutan

Marselinus Dasmal Luron  
NIM. 1265141026

P2 : Dr. Maharuddin P, Mei 13/5 2015



## Lampiran 7



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jalan : A.P. Pettarani Makassar

Laman : [FIS\\_UNM@unm.ac.id](mailto:FIS_UNM@unm.ac.id)

Nomor : 2471/UN36.6/PI/2016

25 Mei 2016

Lamp. : -

Hal : Permintaan Izin Melaksanakan  
Penelitian

Yth. : **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan

Dimohon dengan hormat kiranya kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini, dapat diberikan izin mengadakan penelitian di: **Kabupaten Tana Toraja** dalam rangka penulisan skripsi.

Nama : **Marselinus Dasmal L**  
Stambuk : 1265141026  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

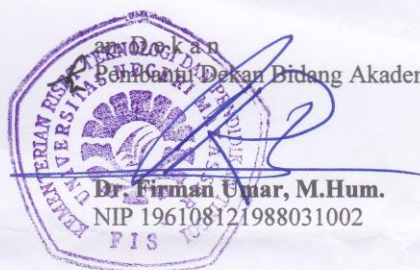
Dosen Pembimbing :

1. Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si.
2. Dr. Maharuddin Pangewa, M.Si.

Masalah yang diteliti :

**Implementasi Kebijakan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja.**

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

  
 Dr. Firman Umar, M.Hum.  
 NIP 196108121988031002

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara

Lampiran 8



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
 ( UPT - P2T )

Nomor : 6656/S.01.P/P2T/05/2016  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
 Bupati Tana Toraja

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar Nomor : 2471/UN36.6/PL/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MARSELIOUS DASMAR L**  
 Nomor Pokok : 1265141026  
 Program Studi : Ilmu Adm. Negara  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. AP. Pettarani, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETIRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DI KABUPATEN TANA TORAJA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **30 Mei s/d 01 Agustus 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 27 Mei 2016

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip. : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
 1. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIS UNM Makassar;  
 2. Pertinggal



## Lampiran 9



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS**  
*Jalan Pongtiku Nomor 122 ☎. (0423) 22876 Makale*

Nomor : 070/131/VI/Kesbang  
 Sifat : Biasa  
 Perihal : **Izin Penelitian**

**Kepada**  
**Yth. 1. Ka. DPPKAD Kab. Tana Toraja**  
**2. Camat Rembon**  
 di  
**Tempat**

Menunjuk surat kepala badan koordinasi penanaman modal daerah Nomor 6656/S.01.P/P2T/052016 Tanggal 27 Mei 2016 perihal tersebut di atas, maka di sampaikan dengan hormat kepada saudara bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

N a m a : **MARSELIUS DASMAR L**  
 Tempat/tanggal lahir : **Makassar, 06 Maret 1994**  
 Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
 Instansi/pekerjaan : **Mahasiswa FIS UNM Makassar**  
 A l a m a t : **Makale**

Bermaksud mengadakan penelitian di daerah / kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DI KABUPATEN TANA TORAJA"**

yang akan dilaksanakan dari tgl **01 Juni 2016** sampai selesai

Pengikut/Anggota Team : tidak ada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melapor kepada Instansi yang bersangkutan.
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas "**Skripsi**" kepada Bupati Tana Toraja Up. Kepala Kantor Kesbang, Politik dan Linmas.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Makale, 01 Juni 2016  
 KEPALA KANTOR,  
  
**Drs. ARMY LENGGO**  
 Pangkat : Pembina TK. 1  
 NIP.19640416 198910 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Tana Toraja di Makale
2. Dan Dim 1414 Tana Toraja di Rantepao
3. Kapolres Tana Toraja di Makale
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale
5. Dekan Bid.Akademik FIS UNM Makassar
6. Sdr. yang bersangkutan
7. Pertinggal

## Lampiran 10


**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET AERAH**  
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 3 Telp. (0423) 22562 Makale

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 800.780/DPPKAD-01/383/VI/2016

Yang tanda tangan dibawah ini Sekertaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenTanaToraja menerangkan bahwa :

Nama	: <b>Marselinus Dasmal.L</b>
No.Induk Mahasiswa	: 1265141026
Jurusan/Universitas	: Ilmu Administrasi Negara/FIS UNM Makassar
Alamat	: Makale

Benar-benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja mulai dari tgl 01 Juni 2016 sampai selesai, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)  
 DI KABUPATEN TANA TORAJA"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makale, 29 Juni 2016

**An. Kepala Dinas  
 Sekretaris,**  
  
**JONI TONGLO, SE.M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP. 19660715 199503 1 006





Lampiran 11

## DOKUMENTASI

### 1. Kegiatan Wawancara



Gambar 1. Kegiatan wawancara dengan Bapak Leksi, S.E.



Gambar 2. Kegiatan wawancara dengan Bapak Welem Balalembang, S.P.



Gambar 3. Kegiatan wawancara dengan Oktaviani Misi, S.E.

Gambar 2. Kegiatan wawancara dengan Bapak Welem Balalembang, S.P.



Gambar 4. Kegiatan wawancara dengan Bapak Andarias

Gambar 2. Kegiatan wawancara dengan Bapak Welem Balalembang, S.P.



## 2. Data Lokasi Penelitian



Gambar 5. Kantor Kecamatan Rembon



Gambar 6. Struktur organisasi Pemerintah Kecamatan

Gambar 5. Kantor Kecamatan Rembon

NO.	NAMA LEMBANG / KELURAHAN	KEPALA LEMBANG / LURAH	NAMA KAMPUNG / LINGKUNGAN	KEPALA KAMPUNG / LINGKUNGAN	JUMLAH DUSUN / RW	JUMLAH RT	KET.
1	REMBON	SENJITA P. JANDIREBUNG	1. LULA 3. TAK'DO 2. REMBON 4. FOX PLANE 3. TONDA 5. LEMBANG	1. ANDRIAN YOH 3. LUTER PARADISE 2. L. L. PANGADANGAN 4. J. PANGIDA 5. LUTER	21	0	
2	TALION	HENDRIK KIRTA	1. MAUDU 4. TUMARKE 2. TAMBUN 3. TAKART	1. B. BATTU 2. A. TANAN	4	8	
3	BANGA	ANNA ADA ALLORERUNG	1. LEMBANG 3. TAKART 2. TAMBUN 4. KATASUK	1. MUH. KIDAE 3. PETRUS BILAN 2. TULLA NABIN 4. P. PULO	4	8	
4	BURI	REMBON	1. TANDUNG 3. TO'AD 2. TANDU 4. KIMBIA	1. L. S. KASIDENE 3. B. TANDU 2. P. L. PULUN 4. M. ATTA	4	8	
5	ULLIN	M. L. PANGALO	1. SUTARAH 3. MERAKI 2. MAUDU 4. KANDIDEN	1. YOHANIS BAKA 3. 2. SAKHES 2. L. DORUNE 4. M. AARU	4	8	
6	SARAPEANG	S. MARTHEN TATO	1. CARONI 3. KAROTIN 2. PANGARANE 4. PANGARANE	1. PETER TANDUNG 3. ARIE JANDIREBUNG 2. SULA PANGARANE 4. J. PANGARANE	4	8	
7	LIMBONG	MUSRI BASO	1. TANDU 3. DEA 2. L. PANG 4. RATTAPUN	1. M. LITTON 3. M. BANGU 2. LINDY PANGARANE 4. YOHANIS BAKA	4	8	
8	BUATARRUNG	M. PANGADANGAN	1. BUTTU 3. KARAPPA 2. LINDY TANDU 4. MERAKA	1. P. PANGARANE 3. Y. PANGARANE 2. C. H. BANGAR 4. PETER T. ARIE	4	8	
9	BATUSURA	FAREL PANGGA LAYUK	1. LINDY BULAN 3. TOLU 2. KOLEAN 4. POG	1. NABUAT 3. T. TOLAK 2. PETER TOLAK 4. M. ANTON	4	8	
10	TO'PAO	DANIEL PAKINDANAN	1. RATTI 3. BJA 2. KIRI 4. PANGIDAN	1. MADA ALI 3. Y. B. PANGALO 2. A. KULUNG 4. D. BANGA DAI	4	8	
11	PALEBAN	WILSON PATULAK	1. KARAPPA 3. LINDY LUKA 2. PANGAR 4. LINDY PANGAR	1. Y. PANGAR 3. M. ANTON 2. M. BANGA 4. M. PANGAR	4	8	
12	KAYUSING	IZAK DENDE	1. PANGAR 3. PANGAR 2. PANGAR 4. MATANG	1. Y. L. KANGAR 3. M. KANGAR 2. DEU KANGAR 4. Y. KANGAR	4	8	
13	MAROSON	PETRUS TANDUNG	1. PANGAR LUKA 3. LINDY 2. PANGAR 4. LINDY 3. PANGAR 4. LINDY	1. H. P. MANGAR 3. A. KANGAR 2. M. KANGAR 4. Y. KANGAR 3. BATO KANGAR 4. Y. PANGAR	5	10	

Gambar 7. Data Administrasi Kecamatan Rembon

# LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RIPH KECAMATAN REMBON KABUPATEN TANA TORAJA

NO.	NAMA LEMBANG / KELURAHAN	JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER		
		K	B	LAIN NYA	K	B	LAIN NYA	K	B	LAIN NYA	K	B	LAIN NYA	K	B	LAIN NYA	K	B	LAIN NYA	K	B	LAIN NYA	K	B	LAIN NYA			
1.	KELURAHAN REMBON	1																										
2.	KELURAHAN TALION	11	24	26	6	11	18																					
3.	LEMBANG KAYUOSING																											
4.	LEMBANG PALEBAN				5	11	16				7																	
5.	LEMBANG TO'PAO																											
6.	LEMBANG BATUSURA	1																										
7.	LEMBANG BUATARRUNG																											
8.	LEMBANG LIMBONG							1																				
9.	LEMBANG SARAPEANG	3	14	18																								
10.	LEMBANG BANGA				5						5	27	21															
11.	LEMBANG BURI	3	7	6				5	3	6	14	13																
12.	LEMBANG MAROSON	4			27	23																						
13.	LEMBANG ULLIN				4		2																					
Jumlah Realisasi		23	46	50	20	38	48	3	5	3	18	31	34															

Gambar 8. Laporan RPH Kecamatan Rembon

## RIWAYAT HIDUP



Marselinus Dasmur Luron, lahir di Makassar, 06 Maret 1993 merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan Daniel Doni Suron dengan Marselina Toding. Peneliti mulai mengenyam pendidikan formal pada tahun 1998 di SD Negeri No. 158 Batusura' dan berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat SD pada tahun 2004.

Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan ke SMP Katolik Rembon dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008, peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Katolik Cenderawasih Makassar dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi pada Universitas Negeri Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial.